

KEMENTERIAN PARIWISATA

Website : http://www.kemenpar.go.id http://www.indonesia.travel



NESPARNAS

Neraca Satelit Pariwisata Nasional **2016**





2016

NESPA

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata



KATA PENGANTAR

Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) Tahun 2016 merupakan publikasi lanjutan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini memuat data yang menggambarkan kondisi pariwisata Indonesia dan peranannya dalam perekonomian nasional tahun 2015.

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai struktur konsumsi wisatawan, nilai investasi, dan promosi di bidang pariwisata selama tahun 2015. Selain itu, juga disajikan informasi mengenai struktur tenaga kerja pada industri-industri yang terkait pariwisata, seperti usaha penyediaan akomodasi, jasa perjalanan wisata dan restoran. Secara detil, buku Nesparnas 2016 memberikan gambaran tentang perilaku wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, maupun wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, dalam melakukan transaksi ekonomi dan konsumsi serta kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi domestik yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, publikasi ini dapat digunakan untuk mengukur dinamika dan skala ekonomi yang terjadi akibat kegiatan pariwisata, mata rantai sektor-sektor ekonomi terkait pariwisata, serta peranan pariwisata dalam perekonomian nasional seperti dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara dari pajak dan retribusi, serta dalam ekspor barang dan jasa.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan cakupan dalam penyusunan Nesparnas di tahun-tahun mendatang. Semoga buku ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun strategi dan kebijakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2016

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Sasmito Hadi Wibowo

Penanggung Jawab Teknis : Titi Kanti Lestari

Norman Sasono

Editor : Titi Kanti Lestari

Sugiharto

Penulis : Akhmad Tantowi

Barudin

Endang Suryani

Pengolah Data/Penyiapan Draft : Suryani Widarta

Suryadiningrat

Wahyu Winarsih

Pipit Helly Sorayan

Nuryadin

Dyah Soendari

Eko Sriyanto

Nur Indah Kristiani

Wiwit Puji S

Rahmad Basuki

Rina Indriani

Beta Septi Iriani

Rayinda Citra Utami

I Dewa Gede Richard Alan Amory

Septia Awal Hidayah

DAFTAR ISI

VATA D			aman
		NTAR	i
		JN	ii
DAFTA	R ISI		iii
DAFTA	R TABE	<u> </u>	V
BAB 1	PENDAHULUAN		
	1.1.	Latar Belakang	3
	1.2.	Permasalahan	6
	1.3.	Tujuan	7
	1.4.	Ruang Lingkup Kegiatan	7
	1.5.	Metodologi	8
	1.6.	Tenaga Ahli	9
	1.7.	Tahapan Kegiatan	9
	1.8.	Institusi Terkait Dalam Penyusunan Nesparnas	11
BAB 2	PEM	AHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN DAN SUMBER DATA	
	NESP	PARNAS	12
	2.1.	Pengertian Umum Nesparnas	14
	2.2.	Pemahaman Supply dan Demand	16
		2.2.1. Supply	17
		2.2.2. Demand	19
	2.3.	Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata	21
		2.3.1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara	21
		2.3.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (<i>Outbound</i>)	22
		2.3.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Inbound)	24
		2.3.4. Struktur Investasi Pariwisata	26
		2.3.5. Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata	28
	2.4.	Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas	29

	2.5.	Model	Pengukuran Dampak Pariwisata	31
BAB 3	STRU	KTUR PE	ENGELUARAN WISATAWAN, INVESTASI DAN PROMOSI	
	PARIWISATA			
	3.1.	Struktu	ur Pengeluaran Wisatawan Nusantara	40
	3.2.	Struktı	ur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	45
	3.3.		ur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri s)	49
	3.4.		ur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi sata	52
	3.5.	Struktı Pembii	ur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan naan Pariwisata	55
BAB 4	DAM	PAK PAF	RIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL	58
	4.1.	Perana	ın Pariwisata dalam Perekonomian	60
	4.2.	Dampa	ak Ekonomi Pariwisata	62
		4.2.1.	Dampak Terhadap Output	66
		4.2.2.	Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto	68
		4.2.3.	Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja	69
		4.2.4.	Dampak Terhadap Pajak atas Produksi Neto	70
BAB 5	TENAGA KERJA INDUSTRI PARIWISATA			
	5.1.	Industri Pariwisata		
	5.2.	Tenaga	a Kerja Usaha Pariwisata	75
		5.2.1.	Struktur Tenaga Kerja Perhotelan	78
		5.2.2.	Struktur Tenaga Kerja Usaha Restoran/Rumah Makan	81
		5.2.3.	Struktur Tenaga Kerja Usaha SPA	83
BAB 6	INDC	NESIA D	PALAM PERSPEKTIF PARIWISATA DUNIA	85
DAFTAI	R PUST	AKA		92
LAMPIF	RAN			94

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi	33
Tabel 3.1.	Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2011-2015 (ribu	
	perjalanan)	40
Tabel 3.2.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Produk Barang dan Jasa	
	yang Dikonsumsi, Tahun 2015	42
Tabel 3.3.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Asal Tahun	
	2015	43
Tabel 3.4.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan Tahun	
	2015	44
Tabel 3.5.	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung	
	ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2011 – 2015	46
Tabel 3.6.	Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa	
	yang Dikonsumsi, Tahun 2015	48
Tabel 3.7.	Pengeluaran Wisman untuk Angkutan Internasional Indonesia	
	Menurut Mode Angkutan, Tahun 2015	49
Tabel 3.8.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri, Tahun	
	2011-2015 (ribu perjalanan)	50
Tabel 3.9.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri	
	Menurut Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan	
	Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2015 (miliar rupiah)	51
Tabel 3.10.	Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung	
	Maupun Tidak Langsung, Tahun 2015 (miliar rupiah)	53

Tabel 3.11.	Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan	
	Pembinaan Pariwisata Tahun 2015 (miliar rupiah)	57
Tabel 4.1.	Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca	
	Penggunaan, Tahun 2015 (triliun rupiah)	61
Tabel 4.2.	Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional, Tahun 2015	62
Tabel 4.3.	Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia, Tahun	
	2015 (miliar rupiah)	64
Tabel 4.4.	Dampak Ekonomi Pariwisata Tahun 2015	66
Tabel 5.1.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Status	
	Pekerjaan Utama, Tahun 2015	75
Tabel 5.2.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Jenis	
	Kelamin, Tahun 2015	76
Tabel 5.3.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut	
	Kelompok Umur, Tahun 2015	76
Tabel 5.4.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut	
	Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2015	77
Tabel 5.5.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut	
	Lapangan Usaha, Tahun 2015	78
Tabel 5.6.	Jumlah Pekerja pada Usaha Akomodasi menurut Jenis	
	Pekerjaan, Tahun 2015 (Persen)	79
Tabel 5.7.	Struktur Pekerja pada Usaha Hotel Berbintang menurut Tingkat	
	Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 (Persen)	80
Tabel 5.8.	Struktur Pekerja pada Usaha Akomodasi Lainnya menurut	
	Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 (Persen)	81
Tabel 5.9.	Persentase Pekerja pada Usaha Restoran/Rumah Makan	
	menurut Kewarganegaraan dan Status Pekerja, Tahun 2015	82
Tabel 5.10.	Persentase Pekerja pada Usaha Restoran/Rumah Makan	
	menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015	83

Tabel 5.11.	Persentase Pekerja pada Usaha SPA menurut Kewarganegaraan	
	dan Status Pekerja, Tahun 2015	84
Tabel 5.12.	Persentase Pekerja WNI pada Usaha SPA menurut Pendidikan,	
	Tahun 2015	84
Tabel 6.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dunia Tahun 2014 dan 2015 (juta	
	orang)	88
Tabel 6.2.	Jumlah Penerimaan dari Wisman Dunia Tahun 2014 dan 2015	89
Tabel 6.3.	Sepuluh Negara Tujuan Wisata Utama di Dunia Tahun 2014 dan	
	2015	90
Tabel 6.4.	Sepuluh Negara Penghasil Devisa Utama di Dunia Tahun 2014	
	dan 2015	91

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Selama lebih dari enam dekade, pariwisata sekarang telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Pembukaan daerah tujuan wisata baru dan investasi di bidang pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai salah satu penggerak utama (*key driver*) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization*, UNWTO) memperkirakan wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan per tahun sebesar 3,3 persen. Sekarang muncul banyak daerah tujuan wisata baru di berbagai negara di dunia diluar negara tujuan wisata yang secara tradisional menjadi tujuan favorit seperti Eropa dan Amerika Utara. Wilayah Asia dan Pasifik diperkirakan mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding kawasan lain, bahkan di negara tertentu pertumbuhannya jauh lebih tinggi.

Perkiraan UNWTO tersebut sudah tentu menggiurkan pelaku usaha pariwisata di berbagai negara. Potensi besar harus mampu ditangkap dan tidak boleh dibiarkan hanya menjadi peluang liar. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia berpacu dan berbenah diri dalam membangun industri pariwisatanya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

Di tengah kompetisi dunia yang semakin ketat, ditambah dengan ancaman keamanan, ekonomi dunia yang belum pulih, dan gejolak politik global yang masih dialami oleh banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, maka dibutuhkan inovasi dan strategi yang tepat, serta produktif untuk merebut pasar pariwisata. Keterkaitan lintas sektor pariwisata akan menjadi mata rantai pendukung bagi gerak ke depan (*moving forward*) pembangunan nasional.

Menangani pariwisata bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan pariwisata melibatkan hampir semua sektor ekonomi baik industri yang berkarakter pariwisata (tourism characteristic industry), seperti hotel dan restoran, maupun industri yang sepintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (demand) berasal dari pariwisata (tourism connected industry). Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatan pariwisata sangat banyak.

Terkait perkembangan pariwisata Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan pariwisata sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Melalui upaya promosi dan peningkatan pelayanan, didukung membaiknya situasi keamanan, serta pemulihan dari krisis ekonomi global yang banyak dialami negara-negara Eropa, statistik kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta, naik 10,29 persen dibanding jumlah wisman tahun 2014.

Disamping peningkatan jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Indonesia adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus). Disadari bahwa wisnus mempunyai peran terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata (Kemenpar) semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan "Pesona Indonesia", diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Pada tahun 2015 diperkirakan jumlah perjalanan wisnus mencapai 256 juta.

Meningkatnya promosi oleh Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) yang dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Dengan adanya kegiatan perjalanan wisata, diharapkan akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan pariwisata khususnya dan perekonomian pada umumnya.

Nilai ekonomi penjualan jasa pariwisata kadang tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk nominal langsung. Nilai ekonomi tersebut seringkali terkesan hanya langsung berhubungan dengan para pelaku pariwisata. Namun, sesungguhnya nilai ekonomi dari kegiatan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh satu sektor tertentu, tapi juga dinikmati oleh berbagai sektor. Sebagai contoh, seorang wisatawan membeli sebuah cenderamata, maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut adalah penjual, pembuat cenderamata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cenderamata tersebut yang dalam kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak ekonomi yang dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait.

Untuk melihat keterkaitan antarsektor serta dampak ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata, dibutuhkan data yang akurat, terpercaya, terkini, dan konsisten yang meliputi aspek-aspek yang terkait dengan pariwisata. Disamping itu, agar terlihat asas manfaat untuk masyarakat luas, perlu penyajian informasi yang jelas dan menyeluruh dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan dinamika masyarakat sekarang ini, dimana tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi suatu keharusan. Dengan adanya informasi pariwisata yang komprehensif, masyarakat, dan dunia usaha diharapkan akan lebih memberikan perhatiannya dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia.

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, maka perlu disusun suatu sistem yang dapat memperlihatkan peranan pariwisata secara komprehensif. Neraca Satelit Pariwisata Nasional atau yang disingkat dengan Nesparnas adalah

suatu sistem neraca terpadu sektor pariwisata yang mampu menjawab tuntutan tersebut. Kajian dan analisis hasil pembangunan kepariwisataan yang selama ini baru mencakup sebagian aspek dan dilakukan secara terpisah-pisah, diharapkan pada masa mendatang menjadi kajian yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan diterapkannya metode Nesparnas yang dilakukan secara berkesinambungan.

Penerapan metode Nesparnas ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahuntahun sebelumnya, yang bertujuan agar dapat tersusun informasi pariwisata dan kegiatan yang terkait pariwisata secara lengkap, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Nesparnas merupakan suatu konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif sektor pariwisata yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (comprehensive), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent), dan terkontrol (controllable). Sistem ini terbilang ampuh dan handal dalam menjawab tantangan penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kepariwisataan pada masa lalu serta sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan pariwisata di masa datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusunan Nesparnas setiap tahun menjadi sangat penting mengingat kebutuhan mendesak, baik dalam menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata maupun kebutuhan analisis yang lebih luas mengenai kinerja sektor pariwisata di Indonesia dan dampak ekonomi yang diciptakan.

1.2. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam menjawab tantangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya adalah bagaimana menyusun dan membentuk sistem dan kerangka informasi kuantitatif kepariwisataan Indonesia yang akurat, handal, konsisten, dan komprehensif, mencakup aspek mikro dan makro ekonomi, serta akomodatif terhadap rekomendasi Badan-Badan Dunia (UNWTO, WTTC).

Dalam perumusan masalah tersebut, submasalah yang diangkat dalam tahapan kegiatan penyusunan Nesparnas 2016 sebagai kelanjutan dan melengkapi kegiatan tahun sebelumnya adalah bagaimana melengkapi data dasar, seperti jumlah wisatawan nusantara, tenaga kerja dan investasi baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata dan pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata atau yang terkait.

1.3. Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyusun Nesparnas dan mempertajam data-data pokok yang akan digunakan dalam penyusunan tabeltabel Nesparnas. Nesparnas disusun dalam bentuk set data kuantitatif dan kualitatif yang berfungsi sebagai kerangka dasar pengembangan subsistem informasi untuk melihat kegiatan kepariwisataan dalam dimensi sektor ekonomi. Nesparnas disusun untuk melihat peranan atau sumbangan pariwisata terhadap perekonomian nasional yang meliputi peranan pariwisata dalam pembentukan PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan pajak pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja. Dari hasil tersebut diharapkan dapat dibuat kebijakan yang tepat dan terarah.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan mencakup dua hal:

A. Kegiatan penyusunan Nesparnas

Penyusunan Nesparnas mencakup dua sisi dari kegiatan pariwisata yaitu sisi permintaan yang mencakup konsumsi wisatawan, investasi, dan promosi, serta sisi penawaran yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.

B. Kegiatan pengumpulan data dunia usaha pariwisata

Kegiatan pengumpulan data dunia usaha pariwisata meliputi pengumpulan data tenaga kerja dan pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata dalam rangka penyusunan Nesparnas dan membuat tabel-tabel yang sesuai dengan rekomendasi yang ada, serta mencakup dua hal: pertama, data tenaga kerja kegiatan dunia usaha yang terkait dengan kegiatan pariwisata, kedua data pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata.

1.5. Metodologi

A. Metodologi Penyusunan Nesparnas

- 1) Pengumpulan data mengenai jumlah dan konsumsi wisatawan diperoleh dari data sekunder yaitu: jumlah dan konsumsi wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Profile Wisatawan Nusantara yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan SUSENAS; jumlah dan konsumsi wisatawan mancanegara diperoleh dari hasil Passenger Exit Survey (PES); dan konsumsi wisatawan Indonesia ke luar negeri diperoleh dari Survey Outbound.
- 2) Untuk mengukur dampak atau peranan pariwisata terhadap perekonomian digunakan model Input Ouput. Model ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) yang berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi wisatawan, investasi sektor pariwisata dan promosi pariwisata di dalam Tabel I-O merupakan faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Selanjutnya masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor I-O dan

mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief untuk memperoleh dampaknya.

B. Metodologi Pengumpulan Data Pengeluaran Dunia Usaha untuk Pariwisata Pengumpulan data primer pada kegiatan ini melalui wawancara langsung terhadap responden terpilih.

1.6. Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Nesparnas Tahun 2016, telah disiapkan suatu **Tim Tenaga Ahli** dari berbagai disiplin ilmu terkait, yaitu ahli metodologi dan *design survey*, ahli neraca nasional, ahli analisis statistik, ahli statistik pariwisata, serta dibantu oleh tenaga operator komputer dan sekretariat/administrasi. Tim bertugas melaksanakan semua kegiatan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai laporan akhir, dan setiap anggota tim memberikan kontribusinya sesuai tugas dan keahliannya. Tim dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas secara langsung mengkoordinasikan seluruh kegiatan masing-masing anggota.

1.7. Tahapan Kegiatan

A. Perencanaan dan Persiapan

1) Studi literatur

Seperti pada tahun sebelumnya, sebagai awal dari kegiatan ini akan dilakukan studi literatur dari *Tourism Satellite Account* (TSA) yang telah direvisi dan dimodfikasi oleh beberapa negara dan evaluasi data tenaga kerja yang telah ada dalam penyusunan Nesparnas sebelumnya.

 Penyusunan variabel dan kerangka tabel pokok nesparnas
 Variabel-variabel dan data pokok yang diperlukan dalam penyusunan nesparnas, terutama data pengeluaran wisatawan dan investasi, diinventarisir dan dikumpulkan pada tahap ini. Data-data tersebut merupakan data sekunder hasil survey yang telah dilakukan. Selain itu juga menyusun kerangka tabel pokok dan data penunjang yang diperlukan.

3) Penyusunan daftar isian

Untuk memperoleh data primer maupun sekunder maka akan disusun kuesioner sebagai alat kumpul data beserta pedoman cara pengisiannya yang didahului dengan menginventarisir item-item yang diperlukan.

B. Pelaksanaan Lapangan

Pengumpulan data lapangan dalam hal ini, akan dilakukan oleh petugas yang telah dilatih dengan menggunakan kuesioner yang telah terstruktur.

C. Pengolahan

 Pengolahan data pengeluaran wisnus dan dunia usaha untuk pariwisata Untuk mempercepat hasil studi ini dilakukan pengolahan dengan sistem komputer dimana dilakukan tahapan-tahapan standar seperti: editing, coding, entry data, tabulasi, dan analisa.

2) Pengolahan Nesparnas

Pengolahan pada tahap ini menggunakan Tabel Input Ouput. Data permintaan akhir dari pariwisata yang telah dikumpulkan pada tahap awal, diklasifikasikan kembali sesuai struktur sektor di Tabel I-O. Dengan menggunakan model dan persamaan matriks yang ada, maka akan diperoleh dampak pariwisata terhadap komponen perekonomian Indonesia.

3) Pembahasan hasil

Sebelum dilakukan analisis perlu dilakukan pembahasan tabel-tabel hasil studi, baik untuk hasil survey dunia usaha, maupun hasil nesparnas secara keseluruhan, untuk lebih mencermati data menurut berbagai karakteristik.

4) Analisis dan penyajian

Sebagai output akhir kegiatan ini akan dilakukan analisis dari hasil tabeltabel olahan yang sudah selesai dibahas dalam bentuk laporan.

1.8. Institusi Terkait Penyusunan Nesparnas

Kerja sama antar institusi/lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan penyusunan Nesparnas ini. Dalam penyusunan Nesparnas ini, ada tiga institusi pemerintah yang terlibat langsung yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata, dan Bank Indonesia. Adapun tim utama dalam penyusunan Nesparnas ini adalah Badan Pusat Statistik, terutama yang bertanggung jawab dalam penyusunan Statistik Pariwisata dan Neraca Nasional. Di lain pihak, Bank Indonesia terlibat dalam penyusunan ini dikarenakan data-data yang diperlukan dalam penyusunan neraca perjalanan, diperoleh dari hasil Nesparnas, serta pengeluaran wisatawan Indonesia yang ke luar negeri. Sementara itu, Kementerian Pariwisata bertanggung jawab dalam menyediakan sumber data utama yaitu data pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia. Ketiga tim ini melakukan diskusi secara reguler khususnya untuk memecahkan masalah teknis seperti bagaimana mendapatkan sumber data, konsep dan definisi serta kerangka Nesparnas.

Di dalam struktur organisasi BPS, terdapat tim Input-Output yang bertanggung jawab dalam penyusunan Tabel I-O. Tabel yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas kali ini adalah tabel I-O 2010. Sebagian dari tim penyusunan tabel I-O terlibat juga dalam penyusunan Nesparnas ini, sehingga Tabel I-O tersebut dapat langsung diimplementasikan ke dalam Nesparnas.

BAB 2

PEMAHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN, DAN SUMBER DATA



2.1. Pengertian Umum Nesparnas

Nesparnas merupakan perangkat neraca yang berisikan data tentang peran kegiatan pariwisata dalam perekonomian nasional. Disebut sistem karena terdiri dari berbagai elemen neraca, dimana satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi, yang digambarkan melalui keterkaitan berbagai jenis transaksinya. Secara spesifik Nesparnas berisikan data tentang perilaku pariwisata dalam melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai institusi ataupun pelaku-pelaku ekonomi domestik dalam bentuk neraca dan matriks.

Nesparnas menggambarkan semua kegiatan dan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan barang-barang dan jasa pariwisata, baik sisi produksi (*supply*) maupun sisi permintaan (*demand*). Sebagai suatu sistem data yang komprehensif, cakupan Nesparnas meliputi: (1) struktur ekonomi dari sektor pariwisata, (2) struktur pengeluaran wisatawan dan besarannya, (3) struktur sektor yang terkait pariwisata, (4) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi daerah, (5) struktur pekerja di sektor pariwisata dan kontribusinya pada pekerja daerah, serta (6) peran sektor pariwisata pada perekonomian daerah.

Sebagai perluasan dari Sistem Neraca Nasional (SNN), Nesparnas dapat digunakan antara lain untuk melihat keterkaitan transaksi yang terjadi antara pelaku pariwisata dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (termasuk penyedia jasa pariwisata) secara mutual. Di samping itu, dapat mengetahui bagaimana peran dan berapa besar kontribusi kegiatan pariwisata dalam sistem ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun secara konsep sangat dimungkinkan membangun neraca-neraca pendukung lainnya dalam Nesparnas dengan mengikuti struktur dan konsep SNN, tetapi kesulitan utama yang dihadapi adalah ketersediaan data dasar. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, Nesparnas yang dibangun di sini hanya akan difokuskan pada kegiatan di sektor produksi atau yang umumnya disebut sebagai sektor riil. Melalui perangkat ini dapat diketahui

dampak kegiatan pariwisata dalam tatanan ekonomi nasional, yang juga bermanfaat bagi perbandingan di tingkat interdaerah.

Dengan demikian, maka perangkat Nesparnas yang akan disajikan hanya berisikan informasi tentang hubungan antara kegiatan pariwisata dengan kegiatan proses produksi barang dan jasa, dalam wilayah ekonomi Indonesia. Hubungan tersebut merupakan interaksi antara pelaku pariwisata dengan produsen pariwisata, dan antarprodusen pariwisata itu sendiri. Beberapa analisis akan diturunkan dari perangkat tersebut, diantaranya analisis tentang nilai tambah yang diturunkan ataupun analisis tentang dampak pariwisata terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil.

Hubungan transaksi antara pelaku pariwisata (fungsi konsumsi) dengan pelaku ekonomi (fungsi produksi) domestik tersebut dalam konteks makro disebut sebagai interaksi antara *Supply* dan *Demand*. Apabila pada keseimbangan makro *Supply* harus sama dengan *Demand*, maka hukum ini tidak berlaku sepenuhnya bagi kegiatan ekonomi pariwisata. Tidak semua produk kegiatan ekonomi tersebut langsung dikonsumsi habis oleh pariwisata, karena ada kegiatan diluar pariwisata yang juga mengkonsumsi produk tersebut. Produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik tersebut apabila dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (*non-resident*) maka akan dicatat sebagai ekspor suatu negara. Begitu pula berlaku sebaliknya apabila produk negara lain dikonsumsi oleh wisatawan nusantara (*resident*) akan dicatat sebagai impor.

Kemudian untuk selanjutnya struktur neraca yang akan disajikan dalam Nesparnas disini adalah keterkaitan *Demand* pariwisata terhadap *Supply* pariwisata yang diturunkan dari neraca produksi, tabel Produk Domestik Bruto (PDB), serta tabel Input-Output. Dari neraca produksi dapat dilihat struktur neraca kegiatan ekonomi khusus yang layanan/produknya memang sebagian besar ditujukan bagi permintaan wisatawan, baik dalam negeri (wisnus) maupun luar negeri (wisman). Hubungan tersebut menggambarkan transaksi langsung yang terjadi antara *Supply* dengan *Demand*. Sedangkan hubungan secara tidak langsung akan disajikan dalam

tabel Input-Output. Tabel Input-Output yang disajikan dalam bentuk matriks tersebut juga akan menghitung dampak kegiatan pariwisata terhadap tatanan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di sektor riil (*multiplier effect*).

Oleh sebab itu, untuk lebih memahami pengertian Nesparnas, disini difokuskan pada kegiatan produksi pariwisata yang berkaitan dengan sektor riil, yang diantaranya menghasilkan parameter-parameter ekonomi makro, seperti tentang output yang dihasilkan, struktur biaya antara, nilai tambah yang diturunkan, investasi fisik yang direalisasikan, serta ekspor dan impor. Informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel maupun sel-sel matriks, yang semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nesparnas.

Dengan demikian makna esensi Nesparnas sebenarnya adalah ingin melihat keseimbangan yang terjadi antara sisi penyediaan dan sisi permintaan jasa pariwisata dalam arti yang lebih spesifik. Selain itu, juga untuk melihat kontribusi kegiatan pariwisata dalam mendukung sistem perekonomian daerah.

2.2. Pemahaman Supply dan Demand

Meskipun mengacu pada konsepsi yang sama, *Supply* (penyediaan atau penawaran) dan *Demand* (permintaan) bagi kegiatan pariwisata disini mempunyai arti yang lebih spesifik. Interaksi ini lebih menggambarkan tentang keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Meningkatnya jumlah wisatawan secara luar biasa dalam satu dekade terakhir memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyelenggaraan paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan wisata atau biro perjalanan merupakan salah satu contoh bagaimana industri pariwisata selalu berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik sehingga wisatawan dapat menikmati layanan yang agak berbeda, bahkan jika dilihat dari segi biaya juga bisa lebih murah.

Dari sisi penyediaan produk jasa pariwisata, terdapat berbagai aktivitas seperti hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, rekreasi dan hiburan, objek wisata, serta kegiatan penunjang seperti persewaan, *money changer*, pusat industri kerajinan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Termasuk juga disini penyediaan layanan pemerintah dalam hal keimigrasian, kepabeanan, informasi pariwisata, keamanan dan sejenisnya

Sedangkan sisi permintaan atau *tourist demand* merupakan permintaan akan barang dan jasa oleh wisatawan untuk tujuan dikonsumsi langsung yang jenisnya merupakan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata tersebut. Secara sederhana pemisahan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat dilihat dalam Diagram 2.1.

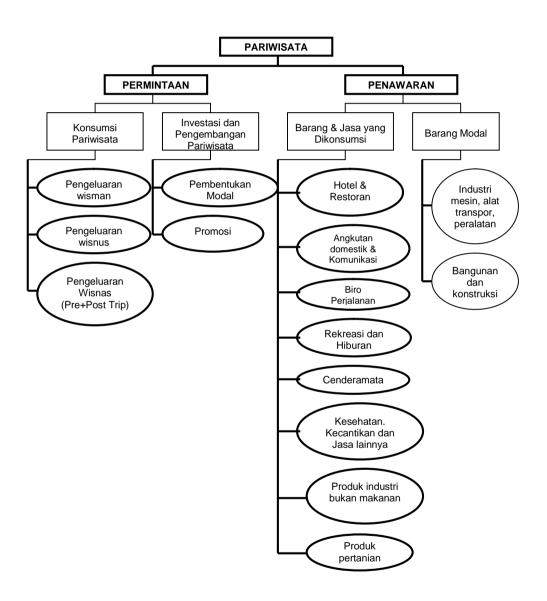
2.2.1. Supply (Penyediaan/Penawaran)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi tiga belas jenis utama, yaitu: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, serta spa. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dalam suatu lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri dan ada salah satu orang yang bertanggung jawab.

Untuk kepentingan analisis, telah disusun Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) berdasarkan rekomendasi dari badan-badan internasional (UN, dan UNWTO), seperti: *Standard International Classification of Tourism Activity* (SICTA), *Tourism Specific Product* (TSP) dan *International Standard of Industrial Classification* (ISIC). Sehingga klasifikasi tersebut sudah merupakan penggolongan operasional bagi kegiatan industri pariwisata yang telah

berkembang di Indonesia selama ini. Klasifikasi ini lebih menekankan pada penggolongan kegiatan ekonomi menurut pelaku produksi (produsen).

Diagram 2.1. Ruang Lingkup Ekonomi Pariwisata dari Sisi Permintaan dan Penawaran



2.2.2. Demand (Permintaan)

a. Klasifikasi

Dari sisi permintaan terdapat aktivitas ekonomi konsumsi yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara (wisman atau *inbound tourist*), wisatawan nusantara (wisnus), wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas atau *outbond tourist*). Sisi permintaan juga mencakup investasi dan promosi di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Konsep yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas adalah permintaan pariwisata dan bukan konsumsi pariwisata karena Nesparnas mencoba untuk mencakup lebih banyak kegiatan pariwisata.

Konsep Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara dan Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri

Dengan demikian maka konsep dan definisi wisatawan apabila dilihat dari sisi permintaan adalah sebagai berikut:

Wisatawan Nusantara (Wisnus)

Adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia (perjalanan dalam negeri) secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria:

- (1) Mereka yang melakukan perjalanan ke objek wisata komersial, tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang dari 100 km pp.
- (2) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel/penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km pp.

(3) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km pp.

Wisatawan Mancanegara (inbound)

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (WTO) dan *International Union Office Travel Organization* (IUOTO) batasan/definisi wisatawan mancanegara atau wisman adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh satu atau beberapa keperluan selain untuk bekerja dengan penduduk di tempat yang dikunjungi. Wisman pada dasarnya dibagi dalam dua golongan:

- (1) Wisatawan (*Tourist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dituju paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan maksud utama kunjungan:
 - a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lainlain.
 - b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
- (2) Pelancong (*Excursionist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dituju kurang dari 24 jam, termasuk *cruise passenger* yang berkunjung ke suatu negara dengan kapal pesiar untuk tujuan wisata, lebih atau kurang dari 24 jam tetapi tetap menginap di kapal bersangkutan.

Wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (outbound)

Konsep wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri bukan untuk bekerja atau memperoleh penghasilan di luar negeri dan tinggal tidak lebih dari

12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: (a) berlibur, (b) bisnis, (c) kesehatan, (d) pendidikan, (e) misi/pertemuan/kongres, (f) mengunjungi teman/keluarga, (g) keagamaan, (h) olahraga, dan (i) lainnya.

2.3. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata

Dalam menyusun Nesparnas dibutuhkan berbagai jenis data baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata maupun data makro. Jenis data dalam Nesparnas pada umumnya berupa data kuantitatif yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam suatu perekonomian negara.

2.3.1 Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Pengeluaran yang dicatat dalam pengumpulan data wisatawan nusantara adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 256 juta lebih pada tahun 2015 dan mulai meningkatnya kesejahteraan penduduk Indonesia, maka tingkat mobilitas penduduk Indonesia juga ikut meningkat. Peningkatan mobilitas penduduk ini mengindikasikan adanya peningkatan penduduk yang melakukan perjalanan "wisata" dalam pengertian luas. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, perjalanan "wisata" yang digunakan sebagai konsep dasar dalam mengumpulkan data wisnus tidak hanya mencakup mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan berekreasi atau berlibur saja tetapi juga termasuk mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, keagamaan, kesehatan, olah raga, seminar/pertemuan, maupun mengunjungi teman/keluarga. Semua orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan tersebut bisa dikategorikan sebagai wisnus apabila perjalanan tidak dilakukan lebih dari 6 bulan, perjalanannya bukan merupakan lingkungan sehari-hari, dan bukan untuk tujuan memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

Pengumpulan data wisnus selama ini dilakukan dengan pendekatan rumahtangga melalui Survei Sosial Ekonomi Daerah (Susenas) dengan metode sampel. Adapun rincian tentang pengeluaran yang ditanyakan mencakup biayabiaya untuk:

- 1. Akomodasi
- 2. Makan dan minum
- 3. Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara
- 4. Paket perjalanan
- 5. Pemandu wisata
- 6. Hiburan dan rekreasi
- 7. Cenderamata atau oleh-oleh
- 8. Kesehatan
- 9. Lain-lain

Semua rincian biaya diatas adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk selama melakukan perjalanan, baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar oleh pihak lain. Disini juga termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh penduduk yang melakukan perjalanan yang sudah menikmati barang atau jasa selama dalam perjalanan namun pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan setelah selesai melakukan perjalanan. Bahkan secara konsep pengeluaran perjalanan juga termasuk pengeluaran yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan tetapi akan digunakan dalam perjalanan, seperti membeli film untuk kamera yang akan digunakan dalam perjalanan. Dalam hal ini termasuk juga pengeluaran yang dilakukan setelah melakukan perjalanan yang masih berkaitan dengan perjalanan yang telah dilakukan, seperti biaya cuci cetak film.

2.3.2 Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (outbound)

Jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri akhir-akhir ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah

membaiknya kondisi perekonomi-an Indonesia. Berdasarkan iklan paket tur ke luar negeri yang cukup gencar di mass media ini menunjukkan bahwa pasar wisata ke luar negeri banyak diminati utamanya oleh mereka yang berkecukupan. Dari data yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri (wisnas), untuk 18 pintu keluar utama, jumlahnya terus meningkat meskipun terjadi perlambatan pada beberapa tahun terakhir. Dan tentu ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang membaik, dalam arti mereka memiliki pendapatan lebih yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan.

Untuk menghitung secara pasti jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa diperoleh dari Ditjen Imigrasi. Namun apabila ingin dilihat negara tujuan mereka di luar negeri masih belum bisa terpenuhi karena sejak tahun 2014 tidak ada kewajiban bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke atau datang dari luar negeri untuk mengisi kartu kedatangan dan keberangkatan (A/D Card) dan sejak Maret 2015 A/D Card sudah dihapus baik untuk WNI maupun WNA. Sehingga data mengenai karakteristik wisnas saat ini belum tesedia sesuai dengan kebutuhan pariwisata.

Data pengeluaran penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri diperoleh dengan survei yang dilakukan di beberapa pintu keluar (*Outbound Survey*). Pendekatan yang dilakukan adalah mewawancarai mereka saat tiba di Indonesia dan menanyakan berbagai karakteristik perjalanan mereka termasuk biaya perjalanan mereka di luar negeri. Dalam menanyakan pengeluaran biaya tiket perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya, dipisah (atau bahkan tidak ditanyakan) karena dalam konsep neraca, biaya tersebut sudah termasuk dalam neraca jasa-jasa (angkutan). Sementara itu biaya transportasi selama di luar negeri tetap dicatat. Namun, survei terhadap penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak dilaksanakan setiap tahun, dan survei terakhir dilaksanakan pada tahun 2013.

Jenis pengeluaran yang ditanyakan dalam survei outbound ini hampir sama dengan survei wisnus, yaitu:

- 1. Akomodasi
- 2. Makan dan minum
- Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara yang dilakukan di luar negeri (tidak termasuk angkutan dari dan ke Indonesia)
- 4. Paket perjalanan
- 5. Pemandu wisata
- 6. Rekreasi dan hiburan
- 7. Cenderamata atau oleh-oleh
- 8. Kesehatan dan kecantikan
- 9. Lain-lain

Dalam rincian pengeluaran di atas juga termasuk pengeluaran sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan dari luar negeri yang masih berkaitan dengan perjalanannya seperti contoh dalam wisnus.

2.3.3 Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Inbound)

Secara konsep penghitungan wisman dilakukan berdasarkan rekomendasi World Tourism Organization (UNWTO) yaitu melalui lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan terhadap pencatatan dan pengawasan lalu lintas orang yang masuk ke atau keluar dari suatu negara, yaitu kantor imigrasi. Untuk memilah siapa saja yang termasuk sebagai wisman berdasarkan konsep tersebut, maka digunakan jenis visa yang dipakai bagi mereka yang berkewarganegaraan asing (WNA) dan jenis paspor bagi mereka warga negara Indonesia (WNI).

Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia adalah wisman, karena WNA yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia. Sehingga apabila mereka ingin pergi ke negara asal mereka kemudian kembali lagi ke Indonesia, mereka tidak dicatat sebagai wisman saat kembali ke Indonesia. Dokumen yang mereka gunakan bukan visa tetapi *Exit Reentry Permit* (ERP) atau *Multiple Exit Reentry Permit* (MERP). Sebaliknya, tidak

semua WNI yang datang dari luar negeri tidak termasuk sebagai wisman. Bagi mereka yang sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 (satu) tahun atau berniat untuk tinggal lebih dari 12 bulan, mereka dicatat sebagai wisman saat datang ke Indonesia.

Untuk mendeteksi penduduk mana vang sebagai luar negeri (Penlu/Pendul) dan mana yang bukan, dari pencatatan laporan UPT Imigrasi belum dapat digunakan untuk data WNI pemegang paspor biasa termasuk di dalamnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk memisahkan data WNI pemegang paspor biasa antara yang merupakan pendul atau bukan, maka perlu dilakukan survei khusus. Pada tahun 2009 Kemenbudpar dan BPS bekerja sama melakukan survei untuk mengetahui rasio WNI pemegang paspor biasa, termasuk TKI, yang dikategorikan sebagai penduduk luar negeri. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan paspor dinas dan paspor diplomatik tidak dipisahkan antara mereka yang berdomisili di luar negeri atau di Indonesia. Untuk itu hanya digunakan perkiraan persentase (rule of thumb) bagi pemegang passport dinas 10 persennya adalah wisman dan bagi pemegang passport diplomatik 50 persennya adalah wisman. Besarnya persentase ini masih perlu dikaji kembali.

Mengingat luas dan banyaknya pintu masuk ke wilayah teritorial Indonesia, untuk melengkapi data wisman maka mulai tahun 2016 dilakukan survei untuk mendeteksi kedatangan wisman di pos-pos lintas batas yang belum dicatat oleh pihak imigrasi karena alasan lokasi maupun kekurangan tenaga. Juga dilakukan pencermatan kembali terhadap WNA pemegang KITAS terkait perubahan kebijakan keimigrasian terkait KITAS. Penerbitan KITAS yang sebelumnya hanya untuk WNA yang akan bekerja, sejak 2015 diperluas juga dapat diterbitkan untuk WNA sebagai wisman lanjut usia, rohaniwan, WNA dengan maksud kunjungan diklat, riset, dan lain-lain.

Sebagai dasar penghitungan devisa yang diterima melalui wisman, tidak hanya jumlah wismannya saja, namun juga diperlukan rata-rata pengeluaran

mereka selama di Indonesia. Untuk mendapatkan rata-rata pengeluaran ini diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan oleh Kemenpar.

Secara ideal penghitungan devisa pariwisata baik yang diterima maupun yang dikeluarkan seperti yang dilakukan dalam penghitungan ekspor dan impor barang melalui dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Setiap barang yang keluar masuk dari dalam dan luar negeri harus mengisi daftar PEB atau PIB yang mencantumkan jenis barang, volume dan nilai dari barang tersebut.

Tujuan utama dalam PES ini adalah untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia menurut negara tempat tinggal mereka, selain rata-rata lama tinggal mereka di Indonesia. Untuk melengkapi keakuratan hasil survei tersebut juga dilakukan studi mendalam ke biro-biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan paket inbound guna lebih mencermati distribusi pengeluaran wisman.

2.3.4 Struktur Investasi Pariwisata

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa trend investasi menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.

Dari studi empiris yang dilakukan di berbagai negara hampir dipastikan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh pola dan struktur investasinya, bahkan juga sumber investasi tersebut apakah dari dana domestik atau dari luar negeri. Investasi dapat terbentuk karena terjadinya surplus usaha yang pada gilirannya kan membentuk tabungan yang merupakan sumber dana utama investasi.

Secara konsep investasi dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu "investasi finansial" dan "investasi non-finansial". Investasi finansial lebih dititik beratkan pada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, emas, tabungan, deposito, saham dan sejenisnya. Sedangkan investasi fisik lebih menekankan pada realisasi berbagai jenis investasi fisik seperti bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan investasi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata disini adalah investasi fisik saja.

Secara definitif yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku investasi tersebut adalah produsen penghasil produk barang dan jasa, baik pemerintah, BUMN/BUMD maupun pihak swasta (termasuk rumah tangga).

Investasi fisik tersebut berupa pembuatan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (hotel, kantor, tempat hiburan dan sebagainya), pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, kendaraan dan barang modal lainnya, termasuk juga perbaikan besar yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas barang modal atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Estimasi yang ada menunjukkan bahwa dari total investasi yang ada, sekitar 4 persen yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Investasi tersebut direalisasikan dalam bentuk berbagai jenis barang modal, diberbagai kegiatan ekonomi dan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber data utama yang digunakan dalam menyusun investasi pariwisata adalah data nilai penyediaan domestik maupun impor yang diturunkan dari tabel Input-Output 2010 dan PDB tahun 2015. Sebagai data banding digunakan data investasi yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam

bentuk persetujuan investasi berdasarkan fasilitas yang diberikan yang dibedakan menurut asal modal perusahaan, yaitu PMA dan PMDN.

Secara umum, pihak swasta paling banyak melakukan PMTB di sektor pariwisata pada jenis barang modal bangunan hotel dan akomodasi lainnya, sedangkan pemerintah tidak melakukan PMTB pada jenis barang modal tersebut. Selanjutnya PMTB berupa bangunan bukan tempat tinggal yang mencakup bangunan kantor, bangunan pabrik dan sebagainya merupakan jenis barang modal terbesar kedua yang dibentuk oleh swasta Jenis barang modal alat angkutan serta bangunan restoran dan sejenisnya menempati urutan ketiga dan keempat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan PMTB terbesar pada jenis barang modal mesin dan peralatan. PMTB pada jenis barang modal alat angkutan merupakan PMTB terbesar kedua. Selain jenis barang modal bangunan, hotel dan akomodasi lainnya, pemerintah juga tidak melakukan PMTB pada jenis barang modal bangunan restoran dan sejenisnya serta bangunan lainnya.

2.3.5 Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata

Pengeluaran lainnya terkait pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, mencakup pengeluaran promosi, pembinaan serta pengeluaran lainnya yang bersifat non investasi atau modal. Pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran promosi, periklanan pada kegiatan yang terkait dengan pariwisata seperti kegiatan perhotelan, restoran, industri pengolahan dan pertanian yang terkait dengan pariwisata, serta sektor jasa yang terkait dengan pariwisata. Secara garis besar pengeluaran ini akan tergambar dalam belanja barang dalam pengeluaran rutin pemerintah. Termasuk pula balas jasa dalam rangka pembinaan pegawai pemerintah yang bergerak di sektor pariwisata yang tercermin dari belanja pegawai dari anggaran rutin pemerintah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan pengeluaran lainnya terkait pariwisata pemerintah berasal dari pengeluaran rutin APBN untuk pemerintah pusat dari Kementerian Keuangan, serta pengeluaran rutin APBD

seluruh provinsi dan kabupaten/kota dari Bappenas. Dan dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat I seluruh provinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota, serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa K3 yang mencakup pengeluaran rutin dari pemerintahan desa yang berasal dari BPS. Disamping itu dipergunakan pula tabel I-O Indonesia tahun 2010 dari BPS.

Pengeluaran pemerintah (*current expenditure*) dalam promosi dan pembinaan pariwisata adalah cerminan dari pelaksanaan sebagian besar anggaran rutin yang berasal dari APBN maupun APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya, dan Dinas Pariwisata pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota, yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya.

2.4. Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas

Ada 10 (sepuluh) jenis tabel ikhtisar dan tabel subneraca yang digunakan sebagai bagian analisis dalam kerangka Neraca Pariwisata (*Tourism Satellite Account*) yang direkomendasikan oleh UNWTO. Tabel-tabel standar ini disusun sedemikian rupa agar kinerja sektor pariwisata dan posisinya dalam ekonomi makro daerah dapat dijelaskan secara terukur dan memadai. Namun demikian struktur tabel dalam Nesparnas ini berbeda dengan sepuluh tabel yang direkomendasikan oleh UNWTO, karena keterbatasan data di Indonesia dan adanya perbedaan klasifikasi dari produk pariwisata. Sebagai contoh data *same day visitors* tidak tersedia secara rinci. Berdasarkan hasil kajian data yang tersedia, tabel-tabel yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

- (1) <u>Tabel 1,</u> menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) menurut jenis-jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan negara asal
- (2) <u>Tabel 2</u>, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan nusantara menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan Provinsi asal (Tabel 2.a) serta Provinsi tujuan (Tabel 2.b)
- (3) <u>Tabel 3</u>, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri, menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan kategori pengeluarannya (yaitu pengeluaran dalam negeri berkaitan dengan *pre dan post-trip* dan pengeluaran di luar negeri berkaitan dengan *trip*-nya sendiri).
- (4) <u>Tabel 4</u>, merupakan penggabungan dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 yang menggambarkan struktur pengeluaran seluruh wisatawan (wisman, wisnus dan outbound) menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan jenis wisatawannya.
- (5) <u>Tabel 5</u>, (subneraca) menggambarkan tentang struktur input industri (sektorsektor) yang terkait dengan pariwisata. Baris-baris pada subneraca ini menunjukkan input yang digunakan dalam suatu proses produksi yang dibagi dalam dua jenis input yaitu: (a) berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sektor pariwisata sebagai input antara, dan (b) balas jasa faktor (nilai tambah) yang diciptakan oleh sektor pariwisata, atau disebut juga sebagai input primer. Subneraca ini lebih menggambarkan sebagai bagian dari suatu sistem produksi yang transaksinya diantaranya disajikan dalam tabel input-output. Dari tabel tersebut dapat dicerminkan keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan barang dan jasa dalam berbagai aktivitas ekonomi pariwisata.
- (6) <u>Tabel 6</u>, (subneraca), memperlihatkan struktur pembentukan modal tetap bruto (investasi fisik) yang merupakan bagian dari investasi yang direalisasikan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Investasi fisik tersebut dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta (daerah dan asing) dalam bentuk

- bangunan hotel, restoran, mesin dan peralatan, alat angkutan, dan barang modal penunjang lainnya.
- (7) <u>Tabel 7</u>, (subneraca), menggambarkan jumlah pekerja yang terlibat pada industri pariwisata menurut sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata
- (8) <u>Tabel 8</u>, (subneraca), memperlihatkan struktur pengeluaran pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha dalam promosi dan pembinaan sektor pariwisata (*current expenditure*), dirinci menurut jenis aktivitas yang dilakukan
- (9) <u>Tabel 9</u>, (sub-neraca), memperlihatkan peranan pariwisata dalam struktur Output dan PDB menurut sektor produksi (Neraca Produksi)

2.5. Model Pengukuran Dampak Pariwisata

Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa negara dari konsumsi wisatawan mancanegara terhadap produk barang dan jasa. Wisatawan nusantara tidak kalah pentingnya memberi porsi besar dalam penciptaan ekonomi daerah maupun regional.

Model Input-Output digunakan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Model ini didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki asumsi homogenitas (kesatuan output), proporsionalitas (hubungan linear input dan output) dan aditivitas. Model ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Kerangka dasar Tabel I-O menggambarkan transaksi produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama (kolom) menunjukkan struktur input sektor-sektor ekonomi, komposisi nilai tambah yang dihasilkan dan struktur permintaan akhir (final

demand) terhadap barang dan jasa. Sisi kedua (baris) menunjukkan distribusi (alokasi) output barang dan jasa untuk proses produksi, final demand, dan impor.

Tabel I-O yang digunakan dalam mengukur dampak pariwisata tahun 2015 adalah Tabel I-O 2010. Beberapa masalah timbul karena sisi penyediaan (*supply*) pariwisata tidak sama dengan struktur yang ada di Tabel I-O. Perbedaan tersebut muncul karena hasil dari penghitungan pengeluaran wisatawan tidak dimanfaatkan dalam kompilasi tabel I-O sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan antara sisi permintaan dan penawaran.

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi daerah, permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran wisnus, wisman, serta pre dan post trip dari wisatawan Indonesia yang keluar negeri, (2) investasi sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dan (3) pengembangan dan promosi pariwisata oleh pemerintah dan swasta, menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Pengeluaran dari wisnus dan *pre* dan *post trip* wisatawan wisnas adalah bagian dari konsumsi rumahtangga, pengeluaran wisman merupakan bagian dari ekspor barang dan jasa, pengeluaran untuk investasi sektor pariwisata adalah bagian dari pembentukan modal tetap dan pengeluaran untuk promosi merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah sedangkan pengeluaran wisatawan Indonesia di luar negeri merupakan impor barang dan jasa.

Dalam pengukuran dampak pariwisata tersebut, masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor dari I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief (dikenal dengan matriks A).

Tabel 2.1. Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi

Alokasi Output			Permir	ntaan <i>A</i>	Antara	Permintaan	Jumlah	
		Sektor Produksi		Akhir	Output			
Struktur	· Input		1	2	3			
Input Antara	Sektor Produksi	1 2 3	X ₁₁ X ₂₁ X ₃₁	X ₁₂ X ₂₂ X ₂₃	X ₃₁ X ₃₂ X ₃₃	F ₁ F ₂ F ₃	X ₁ X ₂ X ₃	
In	put Primer		V_1	V_2	V_3			
Ju	mlah Input		X ₁	X ₂	X ₃			

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi nasional, permintaan akhir menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata, faktor pendorong (exogenous variable) berupa konsumsi wisatawan mancanegara (inbound), wisatawan nusantara (wisnus), wisatawan Indonesia ke luar negeri (outbound) terhadap produk dalam negeri, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (APBN), serta lembaga-lembaga nirlaba yang ikut andil dalam kegiatan pariwisata. Dengan model IO dampak kepariwisataan dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Output

Pengeluaran konsumsi pariwisata akan berdampak terhadap penciptaan nilai produksi barang dan jasa sektoral. Hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan nilai output dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$X_i = (I-A^d)^{-1}. C_i$$
(1)

dimana:

Xi = output yang diciptakan akibat konsumsi kepariwisatawaan.

 $(I-A^d)^{-1}$ = invers matriks berfungsi sebagai koefisien regresi dalam model.

C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound,
 3) wisnus, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata.

i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (1) mendasarkan hubungan linier antara permintaan akhir, dalam hal ini konsumsi pariwisata dengan output. Semakin besar jumlah permintaan terhadap produk barang dan jasa maka output yang harus disediakan harus bertambah mengikuti matriks pengganda sebagai koefisien regresinya. Persamaan di atas menghasilkan nilai output barang dan jasa setiap sektor akibat dari konsumsi pariwisata. Dapat diketahui dampak output akibat masing-masing komponen konsumsi pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi. Misalkan, pengeluaran wisman di Indonesia akan berdampak terhadap penambahan nilai produksi barang dan jasa. Demikian pula akibat adanya aktifitas wisnus, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pengembangan pariwisata akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

2. Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto

Nilai tambah bruto (NTB) merupakan bagian dari nilai output sektor ekonomi. Sebagai balas jasa atas faktor produksi, NTB mencakup kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi (pajak atas produksi neto). Sebagaimana model I-O untuk menghasilkan nilai output akibat konsumsi pariwisata, nilai tambah yang diciptakan juga berbanding

lurus dengan permintaan atau konsumsi kepariwisataan. Formulasi yang menunjukkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$V_i = v (I-A^d)^{-1} . C_i$$

= $v . X_i$ (2)

dimana:

V_i = nilai tambah bruto karena dampak konsumsi kepariwisataan.

 matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio antara nilai tambah bruto sektor tertentu dengan outputnya.

C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata

i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (2) menunjukkan hubungan searah antara nilai tambah bruto dengan nilai outputnya. Ini juga berarti bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan penciptaan nilai tambah sektor ekonomi, yaitu pengeluaran wisman, wisnus, investasi pariwisata, dan lainnya. Selanjutnya produk domestik bruto (PDB) dihitung berdasar nilai NTB ditambah pajak dikurangi subsidi lainnya atas produk (pajak atas produk neto).

Pajak atas produk adalah pajak yang dibayar per unit barang atau jasa. Pajak dapat berupa sejumlah uang per kuantitas barang atau jasa (volume, berat, kekuatan, jarak, waktu), atau dihitung berdasarkan nilai sebagai presentase spesifik dari harga per unit atau nilai barang dan jasa yang ditransaksikan. Sementara subsidi atas produk adalah subsidi yang dibayar per unit barang atau jasa. Subsidi dapat berupa jumlah uang tertentu per unit barang atau jasa, atau dihitung berdasarkan nilai persentase tertentu dari harga per unit. Subsidi juga dapat dihitung sebagai selisih antara harga tertentu dan harga pasar aktual yang dibayar pembeli.

3. Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja dan Pajak atas Produksi Neto

Salah satu komponen nilai tambah bruto adalah kompensasi tenaga kerja dan pajak kurang subsidi lainnya atas produksi (pajak atas produksi neto). Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas produksi. Dari model I-O dapat diturunkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$V_{ji} = v_j (I-A^d)^{-1} \cdot C_i$$

= $v_i \cdot X_i$ (3)

dimana:

 V_{ji} = Kompensasi tenaga kerja dan pajak atas produksi neto akibat konsumsi kepariwisataan.

v_j = matriks diagonal koefisien kompensasi tenaga kerja dan pajak atas produksi neto, yaitu rasio antara upah/gaji dan pajak tak langsung sektor tertentu dengan outputnya.

j = 1) kompensasi tenaga kerja, 2) pajak atas produksi neto.

C_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata, dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata

i = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (3) ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan kompensasi tenaga kerja sektor-sektor ekonomi dan penerimaan pajak bagi pemerintah dari aktivitas ekonomi tersebut.

4. Dampak Terhadap Kesempatan Kerja

Dalam setiap aktivitas ekonomi dan produksi, dibutuhkan sejumlah faktor produksi, diantaranya yang penting adalah tenaga kerja. Dalam hubungan yang sederhana, setiap unit produk yang dihasilkan akan membutuhkan input tenaga kerja. Dengan demikian, pengeluaran wisatawan terhadap barang dan jasa akan dapat dihitung pula dampaknya pada kesempatan kerja.

Pariwisata memiliki dimensi yang sangat luas dan lintas sektor. Usaha pariwisata tidak terbatas pada sektor usaha yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, tetapi juga mencakup berbagai sektor usaha lain yang pembinaannya di bawah kewenangan kementerian/lembaga lain.

Pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Bidang Pariwisata Indonesia untuk mengidentifikasi usaha atau industri yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata. Klasifikasi tersebut merupakan sinkronisasi antara usaha pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta turunannya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Selain bermanfaat untuk pembinaan, klasifikasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam penyusunan data statistik terkait usaha pariwisata, antara lain mengetahui jumlah usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan karakteristik lainnya terkait industri atau usaha yang dikategorikan industri pariwisata.

Namun, mengingat luasnya cakupan usaha pariwisata, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, pembahasan tenaga kerja pada bagian ini hanya akan difokuskan pada tenaga kerja yang bekerja pada industri atau usaha yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata sebagai mana dijabarkan pada Lampiran A. Sumber data yang digunakan berasal dari Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahun.

BAB3

STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN, INVESTASI, DAN PROMOSI PARIWISATA



Dampak pariwisata terhadap perekonomian sangat ditentukan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarannya, (2) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi nasional, (3) struktur pengeluaran untuk promosi pariwisata, dan (4) struktur pekerja dan kontribusinya terhadap pekerja nasional. Pendekatan yang digunakan untuk melihat dampak kegiatan pariwisata terhadap perekonomian adalah menggunakan analisis dampak dengan model input-output.

3.1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Seiring kondisi perekonomian yang terus tumbuh, diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mampu membelanjakan sebagian penghasilannya untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok, salah satunya untuk melakukan perjalanan wisata. Jumlah perjalanan wisnus pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 256,4 juta, naik sebesar 2,06 persen dibanding tahun 2014 yang sebanyak 251,2 juta. Jumlah perjalanan tersebut terbesar berasal dari Jawa Barat yaitu 44,4 juta perjalanan, diikuti Jawa Timur 40,74 juta perjalanan. Jumlah perjalanan ini sejalan dengan jumlah penduduk di kedua provinsi ini yang memang besar.

Tabel 3.1. Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2011-2015 (ribu perjalanan)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah perjalanan	236 752	245 290	250 036	251 237	256 419

Sumber: BPS

Bila dilihat *travel balance* menurut provinsi, jumlah perjalanan wisnus yang masuk ke suatu provinsi tidak berbeda jauh dengan mereka yang keluar dari provinsi tersebut. Pola ini juga terjadi pada deerah-daerah yang jumlah penduduknya relatif besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah wisnus yang berkunjung maupun yang keluar juga proporsional.

Berdasarkan data jumlah wisnus yang keluar dan masuk, maka setiap provinsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) Provinsi yang secara konsisten mempunyai *travel balance* positif seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, artinya jumlah wisnus yang berkunjung ke provinsi ini lebih tinggi dari jumlah wisnus yang berasal dari provinsi bersangkutan, (2) Provinsi yang mempunyai *travel balance* negatif seperti DKI Jakarta dan beberapa provinsi di Indonesia Timur, artinya jumlah wisnus yang berkunjung ke provinsi ini lebih rendah dari jumlah wisnus yang berasal dari provinsi bersangkutan, dan (3) Provinsi yang mempunyai *travel balance* tidak tetap, seperti Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Perjalanan wisnus ke suatu daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga perjalanan wisnus selain ikut memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan, juga bisa merupakan sarana pemerataan pendapatan antar daerah. Dari 256,4 juta perjalanan wisnus pada tahun 2015, jumlah pengeluaran konsumsinya mencapai Rp 224,69 trilyun atau rata-rata pengeluaran per perjalanan mencapai Rp 876,3 ribu. Bagian terbesar pengeluaran ini digunakan untuk angkutan domestik, yaitu 37,16 persen, sementara pengeluaran untuk akomodasi hanya mencapai 10,41 persen. Ini mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan domestik banyak yang tidak menggunakan jasa akomodasi komersial, mereka lebih senang menginap di rumah teman, kenalan, atau keluarganya.

Sementara pengeluaran untuk makanan dan minuman mencapai 22,15 persen dari total pengeluaran, dan pengeluaran untuk membeli cenderamata mencapai 4,91 persen. Sementara itu, pengeluaran wisnus yang paling kecil adalah

untuk pembayaran jasa pariwisata lainnya serta kegiatan kesehatan dan kecantikan yang masing-masing sebesar 1,92 persen serta 0,06 persen dari total pengeluaran. Hal ini disebabkan sebagian besar tujuan utama wisnus melakukan perjalanan selain berlibur adalah untuk mengunjungi keluarga atau bersilaturahmi.

Tabel 3.2. Struktur Pengeluaran Wisnus menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2015

Jenis Produk	Nilai (miliar rupiah)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Hotel dan akomodasi	23 399,36	10,41
2. Restoran dan sejenisnya	49 760,04	22,15
3. Angkutan domestik	83 487,64	37,16
 Biro perjalanan, operator & Pramuwisata 	4 837,98	2,15
5. Jasa seni budaya, rekreasi & hib	5 869,26	2,61
6. Jasa pariwisata lainnya	4 312,68	1,92
7. Cenderamata	11 035,15	4,91
8. Kesehatan dan kecantikan	137,33	0,06
9. Produk industri non makanan	33 652,97	14,98
10. Produk pertanian	8 201,43	3,65
Total Pengeluaran	224 693,84	100,00

Sumber: BPS

Selanjutnya Tabel 3.3. dan Tabel 3.4. memperlihatkan struktur pengeluaran wisnus menurut provinsi asal dan tujuan. Bagi provinsi yang menerima kunjungan, maka seluruh pengeluaran wisnus di provinsi tersebut merupakan "devisa" yang diperoleh dari luar provinsi. Namun apabila wisnus hanya melakukan perjalanan dalam provinsi di mana mereka tinggal, maka pengeluarannya hanya berdampak pada sektor usaha di provinsi itu sendiri.

Tabel 3.3. Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Asal, Tahun 2015

Provinsi Asal	Nilai (miliar rupiah)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Sumatera Utara	4 958,92	2,21
2. Sumatera Barat	3 806,42	1,69
3. DKI Jakarta	19 749,36	8,79
4. Jawa Barat	33 642,67	14,97
5. Jawa Tengah	14 307,58	6,37
6. DI Yogyakarta	4 384,29	1,95
7. Jawa Timur	19 166,25	8,53
8. Bali	4 850,07	2,16
9. Sulawesi Utara	4 226,68	1,88
10. Sulawesi Selatan	7 282,47	3,24
11. Lainnya	108 319,15	48,21
INDONESIA	224 693,84	100,00

Sumber: BPS

Pengeluaran wisnus terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, mencapai 14,97 persen dari total belanja, diikuti DKI Jakarta dan Jawa Timur masing-masing 8,79 persen dan 8,53 persen. Sementara itu konsumsi wisnus dari Jawa Tengah mencapai 6,37 persen.

Berbeda dengan provinsi asal wisnus, provinsi dengan penerimaan terbesar dari perjalanan domestik adalah DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut masing-masing menerima kontribusi 26,57 persen, 15,36 persen, dan 12,58 persen dari total pengeluaran wisnus. Hal ini dapat dilihat dari struktur pengeluaran wisnus menurut provinsi tujuan seperti disajikan pada Tabel 3.4. Provinsi yang mendapat "devisa" cukup besar masih berlokasi di Pulau Jawa dengan jumlah wisnus yang besar.

Tabel 3.4. Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan,
Tahun 2015

Provinsi Tujuan	Nilai (miliar rupiah)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Sumatera Utara	6 061,80	2,70
2. Sumatera Barat	2 299,12	1,02
3. DKI Jakarta	59 696,95	26,57
4. Jawa Barat	34 507,04	15,36
5. Jawa Tengah	19 936,19	8,87
6. DI Yogyakarta	11 202,01	4,99
7. Jawa Timur	28 295,77	12,59
8. Bali	7 933,64	3,53
9. Sulawei Utara	2 264,73	1,01
10. Sulawesi Selatan	10 894,19	4,85
11. Lainnya	41 602,41	18,52
INDONESIA	224 693,84	100,00

Sumber: BPS

Hal ini wajar karena jumlah penduduk di pulau Jawa merupakan yang terbesar. Selain itu, struktur ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih merupakan daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia. Sementara itu Bali yang merupakan daerah wisata tujuan bagi wisman, ternyata tidak demikian halnya bagi wisnus. Distribusi pendapatan dari wisnus di Provinsi Bali hanya 3,53 persen dari total pengeluaran wisnus, jauh lebih rendah dari DKI Jakarta yang mencapai 26,57 persen.

3.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman, sudah barang tentu akan memberikan arti yang lebih baik bagi perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat konsumsi wisman merupakan peranan kedua yang signifikan dalam struktur pengeluaran pariwisata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pencatatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh Indonesia dan survei di pos-pos lintas batas yang belum ada pos pemeriksaan imigrasi, jumlah kunjungan wisman di tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisman mencapai 10,41 juta orang. Jumlah ini naik 10,29 persen dibandingkan dengan jumlah wisman tahun 2014 yang sebanyak 9.44 juta orang. Naiknya jumlah wisman tahun 2015 ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam (internal factors) maupun luar (external factors). Semakin gencarnya promosi pariwisata Indonesia di berbagai negara dan media dengan branding Wonderful Indonesia, diyakini sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. Kenaikan jumlah wisman ini terjadi hampir di semua pintu masuk utama ke Indonesia. Hal lain yang cukup mendukung kedatangan wisman pada tahun ini adalah semakin kondusifnya situasi keamanan dalam negeri, serta perkembangan perekonomian yang semakin baik khususnya di negara-negara pemasok wisman ke Indonesia, seperti Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Australia. Di sisi lain, walaupun masalah keamanan global kurang kondusif pada beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan Timur Tengah, namun dampaknya pada kunjungan wisman ke Indonesia di tahun 2015 tidak begitu besar.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah kunjungan terbanyak berasal dari warga negara Singapura yang mencapai 1,62 juta orang atau 15,61 persen dari total kedatangan wisman, kemudian diikuti oleh wisman berkebangsaan Malaysia dan Tiongkok dengan kontribusi masing-masing sebesar 14,02 persen dan 12,11 persen. Kedekatan geografis secara umum

menjadi faktor utama besarnya jumlah wisman dari negara-negara tersebut. Wisman berkebangsaan Singapura jumlahnya secara konsisten tetap terbesar sejak tahun 2011 dan cenderung terus meningkat. Begitu juga dengan wisman berkebangsaan Malaysia pada tahun ini tetap menempati urutan kedua sebagai penyumbang wisman ke Indonesia di bawah Singapura. Disamping faktor geografis, kedatangan jumlah wisman berkebangsaan Malaysia ini juga disebabkan karena faktor hubungan historis sesama rumpun melayu. Selanjutnya wisman berkebangsaan Tiongkok yang tahun sebelumnya menempati urutan keempat terbesar, dalam tahun ini naik ke urutan tiga menggeser Australia. Dibanding keadaan 5 tahun yang lalu (2011), jumlah wisman yang berasal dari China mengalami peningkatan dua kali lipat lebih. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan semakin terbukanya sistem politik dan ekonomi China menyebabkan jumlah perjalanan penduduknya ke luar negeri semakin tinggi.

Tabel 3.5. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Indonesia Menurut Kebangsaan, Tahun 2011-2015

Kebangsaan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Singapura	1 324 839	1 324 706	1 432 060	1 559 044	1 624 058
Malaysia	1 173 351	1 269 089	1 380 686	1 418 256	1 458 593
Tiongkok	594 997	726 088	858 140	1 052 705	1 260 700
Australia	933 376	952 717	983 911	1 145 576	1 099 058
Jepang	423 113	463 486	497 399	505 175	549 705
Korea Selatan	320 596	328 989	351 154	352 004	387 473
India	181 791	196 983	231 266	267 082	319 608
Inggris	201 221	219 726	236 794	244 594	292 745
Amerika Serikat	203 205	217 599	236 375	246 397	276 027
Filipina	210 029	236 866	247 573	248 182	273 630
Lainnya	2 083 213	2 108 213	2 346 771	2 396 396	2 865 162
Jumlah	7 649 731	8 044 462	8 802 129	9 435 411	10 406 759

Sumber: BPS

Sementara dilihat dari uang yang dibelanjakan wisman selama mengunjungi Indonesia, pada tahun 2015 total konsumsi wisman di Indonesia, selain untuk biaya angkutan dari negara asalnya menuju Indonesia, mencapai Rp 163,73 triliun. Jika dibandingkan dengan nilai konsumsi wisman pada tahun 2014 yang berjumlah Rp 132,63 triliun, konsumsi wisman tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (23,44 persen). Peningkatan jumlah konsumsi wisman ini disebabkan selain karena kenaikan jumlah kunjungan wisman juga karena meningkatnya rata-rata konsumsi/belanja wisman per kunjungan di Indonesia. Berdasar hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilaksanakan Kemenpar, rata-rata pengeluaran per kunjungan wisman selama di Indonesia pada tahun 2015 mencapai US\$ 1.202, yang berarti meningkat dibanding rata-rata pengeluaran pada tahun 2014 yang sebesar US\$ 1.183.

Berbeda dengan struktur pengeluaran pada wisnus, pengeluaran wisman terbesar adalah untuk membayar hotel atau akomodasi lainnya, yaitu mencapai 41,59 persen dari total pengeluaran, diikuti pengeluaran untuk membeli makanan dan minuman serta angkutan domestik masing-masing 20,39 persen dan 10,58 persen. Pengeluaran untuk membeli cenderamata juga cukup besar, yaitu mencapai 6,60 persen. Sebaliknya porsi pengeluaran wisman yang terkecil adalah untuk konsumsi jasa pariwisata lainnya yang hanya 0,74 persen dari total pengeluaran. Demikian pula halnya wisman dengan tujuan kesehatan dan kecantikan, yang masih kecil porsinya. Hal ini karena memang wisman yang datang ke Indonesia dengan tujuan kesehatan/berobat dan kecantikan sangat kecil jumlahnya disebabkan Indonesia belum merupakan daerah tujuan wisata kesehatan seperti halnya Malaysia dan Singapura.

Tabel 3.6. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2015

Jenis Produk	Nilai (miliar rupiah)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Hotel dan akomodasi	68 093,40	41,59
2. Restoran dan sejenisnya	33 390,83	20,39
3. Angkutan domestik	21 967,78	13,42
 Biro perjalanan, operator dan pramuwisata 	3 681,05	2,25
5. Jasa seni budaya, rekreasi & hiburan	6 173,61	3,77
6. Jasa pariwisata lainnya	1 211,25	0,74
7. Cenderamata	7 407,51	4,52
8. Kesehatan dan kecantikan	2 940,73	1,80
9. Produk industri non makanan	16 273,25	9,94
10. Produk pertanian	2 589,32	1,58
Sub Jumlah	163 728,75	100,00
11. Angkutan internasional	11 986,04	
Jumlah	175 714,78	

Sumber: Kementerian Pariwisata

Sementara pengeluaran wisman untuk transportasi dari negara asalnya ke Indonesia dan sebaliknya yang menggunakan maskapai Indonesia mencapai Rp. 11,99 triliun. Angkutan udara masih merupakan sarana utama yang digunakan wisman ke Indonesia. Pengeluaran wisman yang dikeluarkan untuk maskapai Indonesia mencapai 89,99 persen. Sehingga total devisa yang masuk ke Indonesia karena kedatangan wisman mencapai Rp. 175,72 triliun.

Tabel 3.7. Pengeluaran Wisman untuk Angkutan Internasional Indonesia Menurut Moda Angkutan, Tahun 2015

Moda Angkutan	Nilai (miliar rupiah)	Distribusi (%)	
(1)	(2)	(3)	
1. Udara	10 786,8	89,99	
2. Air	1 186,7	9,90	
3. Darat	12,5	0,10	
Total Pengeluaran	11 986,0	100,00	

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015 (diolah kembali)

3.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri

Selama lima tahun terkhir, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri (wisnas) menunjukkan trend peningkatan. Di samping adanya peningkatan kemampuan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita penduduk sekitar 5 (lima) persen per tahun. Hal lain yang ikut mempengaruhi penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri antara lain faktor kenyamanan dan keamanan di negara yang dikunjungi, serta harga perjalanan yang harus dibayar. Dengan berkembangnya perang tarif antar maskapai penerbangan serta gencarnya promosi dari negara-negara lain, terutama negara tetangga (ASEAN), menjadi pemicu penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dilihat dari sisi neraca pembayaran sektor jasa, dalam hal ini komponen travel (pariwisata), masih mengalami surplus hingga akhir tahun 2015. Namun demikian seiring meningkatnya jumlah perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri, dikhawatirkan surplus itu akan semakin berkurang dan dapat menjadi balance ataupun negatif. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisnas mencapai 8,18 juta kunjungan atau naik 1,27 persen dibanding tahun 2014. Dari sisi pengeluaran atau konsumsi hingga tahun 2015, total pengeluaran wisman masih

lebih tinggi dibanding wisnas, sehingga devisa yang dihasilkan masih bernilai positif (surplus).

Tabel 3.8. Jumlah Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri,
Tahun 2011-2015 (ribu perjalanan)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah perjalanan	6 750	7 454	8 025	8 074	8 176

Sumber: BPS

Dari hasil *survey outbound* (terakhir 2013), wisnas terbanyak berkunjung ke negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Meningkatnya jumlah kunjungan ke kedua negara tersebut karena selain kedekatan geografis juga karena menariknya promosi dari kedua negara tersebut, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan demikian semakin banyak penduduk Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera yang pergi berobat ke Malaysia maupun Singapura. Demikian juga orang yang pergi ke luar negeri dengan tujuan keagamaan, terutama umroh, terus mengalami peningkatan. Sementara itu dari sisi konsumsi wisatawan Indonesia yang ke luar negeri, perencanaan dan persiapan dalam melakukan perjalanan biasanya dibuat jauh hari sebelum perjalanan tersebut dilakukan. Terlebih lagi perjalanan ke luar negeri, yang harus dibekali dengan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa.

Tabel 3.9. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Menurut
Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan Jasa yang
Dikonsumsi, Tahun 2015 (miliar rupiah)

	Kategori Pengeluaran				
Jenis Produk	Pre-Trip	Trip	Post-Trip	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Hotel dan akom. Lain	62,10	31 774,02	29,26	31 865,37	30,38
2. Rest. & sejenisnya	694,34	14 431,41	327,12	15 452,87	14,73
3. Angkutan	997,50	6 458,00	469,95	7 925,46	7,56
4. BPW, Pramuwisma	1 336,36	1 025,07	629,60	2 991,03	2,85
5. Jasa seni, budaya	-	2 446,67	-	2 446,67	2,33
6. Jasa Par. Lainnya	-	3 670,01	-	3 670,01	3,50
7. Cenderamata	-	7 300,56	-	7 300,56	6,96
8. Kesehatan & Kecantikan	-	9 722,73	-	9 722,73	9,27
9. Prod. non makanan	1 799,41	19 634,87	847,76	22 282,04	21,24
10.Produk pertanian	-	1 227,15	-	1 227,15	1,17
Jumlah	4 889,71	97 690,51	2 303,69	104 883,90	100,00

Sumber: BPS dan Kementerian Pariwisata

Dalam analisis ini sebenarnya pengeluaran wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak hanya uang yang mereka belanjakan di luar negeri saja (merupakan pengurang devisa) tetapi juga uang yang mereka belanjakan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah mereka kembali ke Indonesia tetapi masih dalam rangkaian perjalanan mereka ke luar negeri. Secara keseluruhan biaya sebelum meninggalkan Indonesia (*pre-trip*) dan sesudah tiba di Indonesia (*post-trip*) yang dikeluarkan relatif kecil, yaitu masing-masing 4,66 persen dan 2,20 persen dari total pengeluaran mereka yang mencapai Rp 104,88 triliun.

Dilihat dari keseluruhan pengeluaran yang mereka lakukan, porsi terbesar adalah untuk akomodasi, yaitu 30,38 persen. Sementara itu untuk keperluan

makan/minum di restoran dan sejenisnya, mereka mengeluarkan dana sekitar 14,73 persen dari total pengeluarannya. Sedangkan untuk keperluan kesehatan dan kecantikan mereka mengeluarkan uang dengan porsi 9,27 persen.

3.4. Struktur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi Pariwisata

Untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015. Dalam pemahaman PDB, investasi dimaksud juga sebagai PMTB. Dari data tersebut terlihat bahwa total investasi swasta yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah sebesar 3,83 persen dari total investasi yang berjumlah sebesar Rp 3.829,98 triliun. Investasi pariwisata ini terdiri dari investasi oleh dunia usaha atau swasta sebesar Rp 146,1 triliun atau sebesar 99,73 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,27 persen dilakukan oleh pemerintah atau senilai Rp 0,40 triliun.

Dari tabel 3.10 dapat dilihat struktur investasi sektor pariwisata baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dirinci menurut jenis barang modal dan pelaku investasinya. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan investasi untuk pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel dan restoran dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan oleh minim dan terbatasnya anggaran pemerintah utamanya anggaran pembangunan, disamping upaya pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata.

Di lain pihak diharapkan kalangan swasta sudah semakin sadar dan memahami pentingnya investasi di bidang pariwisata ini untuk menangkap peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan keadaan pada tahun 1990-an, dimana kemampuan swasta pada waktu itu masih sangat terbatas

sehingga pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas dan akomodasi untuk menampung jumlah wisatawan yang mulai meningkat jumlahnya.

Tabel 3.10. Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun

Tidak Langsung, Tahun 2015 (miliar rupiah)

Jania Davana Madal	Swasta/RT/	Pemer	intah	lumalah
Jenis Barang Modal	BUMN/ BUMD	Pusat	Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Hotel &	25 304,18	-	-	25 304,18
Akomodasi lainnya				
2. Bangunan Restoran &	9 400,15	-	-	9 400,15
sejenisnya				
3. Bangunan Bukan Tempat	30 500,98	6,63	6,11	30 513,72
Tinggal				
4. Bangunan OR, rekreasi,	16 383,92	15,44	14,39	16 413,75
hiburan, seni & budaya				
5. Infrastuktur	26 330,89	13,10	10,31	26 354,30
(Jalan, Jembatan,				
Pelabuhan)				
6. Bangunan Lainnya	12 318,22	-	-	12 318,22
7. Mesin dan Peralatan	8 911,83	130,65	102,89	9 145,37
8. Alat Angkutan	9 360,71	40,89	50,73	9 452,33
9. Barang modal Lainnya	7 651,42	1,71	3,05	7 656,18
Jumlah	146 162,29	208,43	187,47	146 558,19
Distribusi (%)	99,73	0,14	0,13	100,00

Sumber: BPS

Walaupun demikian pemerintah masih melakukan investasi untuk bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan yang berhubungan dan menunjang kegiatan kepariwisataan, seperti bangunan untuk olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya dengan nilai yang masih relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan pihak swasta. Umumnya fasilitas bangunan ini lebih bersifat kepada pelayanan publik dan masyarakat sehingga nilainya pun tidak akan memenuhi profit keekonomian. Begitu juga pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan) yang terkait pariwisata kalau dilihat secara besaran nilainya memang juga masih terlalu kecil. Tetapi sesuai dengan tugas pemerintah sebagai agen pembangunan di segala bidang maka cerminan ini lebih kepada pelayanan masyarakat untuk menunaikan tujuan wisatanya.

Dari seluruh investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, terlihat bahwa investasi terkait sektor pariwisata pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 investasi mencapai Rp 146,56 triliun sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 135,34 triliun. Sementara itu investasi yang dilakukan pemerintah terbesar adalah untuk mesin dan peralatan serta alat angkutan masing-masing sebesar Rp 233,54 miliar dan Rp 91,62 miliar atau masing-masing sebesar 58,99 persen dan 23,14 persen dari total investasi pemerintah. Investasi mesin dan peralatan serta alat angkutan ini pada umumnya adalah barang modal dan alat-alat pemerintah yang dipergunakan di kantor-kantor pemerintah yang mengurus kepariwisataan seperti Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya baik di tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Dinas Pariwisata pada pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota.

Sedikit berbeda dengan pola beberapa tahun sebelumnya, dimana investasi swasta terbesar adalah untuk pembangunan hotel dan akomodasi lain dan infrastruktur, tahun 2015 pihak swasta paling banyak melakukan investasi untuk pembangunan bangunan bukan tempat tinggal senilai Rp 30,50 triliun atau

20,87 persen terhadap total investasi swasta, diikuti dengan infrastruktur sebesar Rp 26,33 triliun, dan bangunan hotel & akomodasi lainnya, serta bangunan olahraga, rekreasi, hiburan seni & budaya masing-masing sebesar Rp 25,30 triliun dan Rp 16,38 triliun. Investasi hotel ini disamping adanya penambahan hotel baru, termasuk juga renovasi besar beberapa hotel dan akomodasi lainnya pada tahun 2015, dan pembangunan gedung-gedung untuk kegiatan budaya dan pariwisata.

Secara keseluruhan, investasi yang terbesar adalah pada bangunan bukan tempat tinggal (20,82 persen dari total investasi) dimana peran swasta sangat besar, diikuti investasi untuk infrastruktur dan bangunan hotel dan akomodasi lainnya masing-masing 17,98 persen dan 17,27 persen.

3.5. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Pariwisata

Dalam rangka upaya meningkatkan jumlah wisman maupun wisnus di Indonesia diperlukan berbagai usaha yang terencana dan terintegrasi. Salah satu cara untuk memperkenalkan citra dan potensi pariwisata Indonesia adalah dengan melakukan promosi secara intensif dan ekstensif baik di dalam maupun luar negeri.

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu perubahan dan kejadian luar biasa. Oleh karena itu, diupayakan untuk membangun opini yang lebih baik tentang Indonesia, baik sosial maupun politik sangat penting. Upaya yang dilakukan adalah membangun informasi yang lebih proporsional mengenai situasi dan kondisi yang sebenarnya, sekaligus memperkenalkan budaya bangsa dan sumber daya pariwisata lainnya. Dengan demikian pariwisata tetap diharapkan secara berkesinambungan menjadi penghasil devisa terbesar di masa mendatang.

Promosi pariwisata yang efektif dan efisien yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan berdampak positif bila dapat menarik lebih banyak minat wisman untuk mengunjungi Indonesia. Dari sisi

penyediaan (*supply*), dilakukan pembinaan usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata serta promosi pariwisata untuk penduduk Indonesia sendiri agar lebih mengenal budaya bangsanya.

Untuk tujuan-tujuan di atas, kemudian Pemerintah mengalokasikan sedikit anggarannya untuk sejumlah kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud di sini adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional, bukan investasi, dengan ciri-ciri produk yang dibeli habis digunakan pada saat dipakai. Dalam kajian ini, jenis-jenis pengeluaran yang dicakup adalah 1) promosi pariwisata, 2) perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata, 3) penyusunan statistik dan informasi pariwisata, 4) penelitian dan pengembangan pariwisata, 5) penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata, 6) keamanan dan perlindungan pariwisata, 7) pengawasan dan pengaturan, serta 8) lainnya.

Sebagian besar sumber pembiayaan kegiatan pemerintah di atas berasal dari anggaran rutin baik dari APBN maupun APBD, termasuk di dalamnya kegiatan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya.

Tabel 3.11. memperlihatkan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan promosi dan pembinaan pariwisata pada tahun 2015 sebesar Rp 8,73 triliun, dengan komposisi 44,52 persen atau Rp 3,88 triliun dikeluarkan oleh pemerintah pusat sedangkan sisanya sebesar Rp 4,84 triliun oleh pemerintah daerah.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran untuk perencanaan dan koordinasi pengembangan pariwisata merupakan pengeluaran pemerintah terbesar dengan porsi 27,29 persen dari total pengeluaran atau sebesar Rp 2,38 triliun, diikuti oleh pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan pariwisata 23,60 persen dari total pengeluaran pemerintah. Sementara itu pengeluaran untuk

promosi sendiri hanya 20,55 persen atau sebesar Rp 1,79 triliun. Pengeluaran yang cukup rendah adalah untuk pengawasan dan pengaturan, serta pengamanan dan perlindungan wisatawan dengan porsi masing-masing sebesar 3,26 persen dan 2,24 persen. Hal ini mungkin disebabkan komponen ini telah banyak dilakukan oleh pihak swasta.

Tabel 3.11. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Pariwisata Tahun 2015 (miliar rupiah)

Jenis Aktivitas		Pemerintah	1	Dist (%)
Jenis Aktivitus	Pusat	Daerah	Jumlah	Disc (70)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 Promosi pariwisata Rencana dan koordinasi Pembangunan Pariwisata 	947,13 1 073,25	846,50 1 307,67	1 793,64 2 380,92	20,55 27,29
Penyusunan statistik dan Informasi Pariwisata	266,47	867,23	1 133,69	12,99
4. Penelitian dan Pengembangan	1 091,30	967,72	2 059,02	23,60
5. Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Pariwisata	80,25	395,55	475,80	5,45
6. Pengamanan dan Perlindungan Wisatawan	49,19	145,93	195,12	2,24
7. Pengawasan dan Pengaturan	103,18	181,15	284,32	3,26
8. Lainnya	273,89	129,70	403,59	4,63
Jumlah	3 884,65	4 841,44	8 726,10	100,00
Distribusi (%)	44,52	55,48	100,00	

Sumber: BPS

BAB 4

DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL



4.1. Peranan Pariwisata dalam Perekonomian

Kegiatan pariwisata mampu menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha bagi negara atau daerah yang dikunjungi. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kepariwisataan, seperti hotel dan restoran di sekitar obyek wisata akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan kesempatan berusaha bagi penduduk lokal seperti pembuatan cenderamata atau bingkisan.

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Dengan menggunakan pendekatan model I-O dapat diperkirakan peran pariwisata di masing-masing sektor yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata. Tabel 4.1. memperlihatkan besarnya porsi pariwisata di masing-masing komponen penggunaan PDB seperti disebutkan di atas. Sedangkan untuk melihat peran pariwisata dalam investasi nasional secara rinci disajikan dalam tabel tersendiri.

Tabel 4.1. Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Penggunaan Tahun 2015 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pariwisata	231,89	8,73	146,56	175,71	97,69
PDB Nasional	6 477,58	1 124,81	3 782,14	2 439,11	2 389,63
Share pariwisata (%)	3,58	0,78	3,88	7,20	4,09

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa peranan pariwisata dalam konsumsi rumah tangga mencapai 3,58 persen. Sementara peranan pariwisata dalam pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil, yaitu hanya 0,78 persen dari total pengeluaran (*current expenditure*) konsumsi pemerintah.

Selanjutnya, peranan pariwisata dalam ekspor barang dan jasa mencapai 7,20 persen, ditentukan dari besarnya konsumsi wisman pada tahun 2015. Sementara peranan pariwisata dalam impor mencapai 4,09 persen. Apabila ingin melihat "accommodation balance", maka komposisi besaran nilai antara ekspor dan impor untuk produk terkait pariwisata menjadi sangat menentukan. Namun analisis kali ini lebih ditekankan pada peranan pariwisata dalam masing-masing struktur konsumsi yang ada dalam PDB.

Peranan investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel tersebut juga menyajikan peranan investasi sektor pariwisata yang dirinci menurut jenis barang modal yaitu (1) bangunan, yang terdiri dari bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal; (2) infrastruktur, misalnya: jalan, jembatan dan dermaga; (3) bangunan lainnya; (4) mesin dan peralatan, (5) alat angkutan; dan (6) barang modal lainnya.

Tabel 4.2. Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional Tahun 2015 (persen)

Struktur Investasi	Peranan pariwisata dalam investasi			
(1)	(2)			
1. Bangunan	4,23			
2. Mesin dan peralatan	2,42			
3. Alat angkutan	5,43			
4. Barang modal lainnya	1,98			
Jumlah	3,88			

Sumber: BPS

Meskipun secara nominal meningkat, tetapi peranan investasi pariwisata terhadap investasi nasional pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding 2014, yaitu dari 3,93 persen menjadi 3,88 persen. Dilihat dari jenis barang modal, maka peranan pariwisata tertinggi ada pada jenis barang modal alat angkutan dengan persentase 5,43 persen dari investasi nasional, sedangkan untuk porsi terendah adalah investasi pada barang modal lainnya yaitu 1,98 persen.

4.2. Dampak Ekonomi Pariwisata

Kegiatan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi dan sosial baik bagi masyarakat sekitar maupun nasional secara umum. Seperti telah diuraikan pada pembahasan di atas, pengukuran kinerja pariwisata menggunakan total nilai transaksi ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata. Transaksi ekonomi pariwisata sendiri dibentuk oleh keseimbangan antara *supply* dan *demand* dari barang dan jasa dalam kaitan pariwisata. Pertemuan antara *supply* dan *demand* pariwisata dirangkum dalam Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas).

Nilai transaksi ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata (*direct economic transaction*) pada tahun 2015 mencapai Rp 562,89 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,83 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar

Rp 501,24 triliun. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah belanja wisman yang mencapai 23,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi wisnus juga mengalami kenaikan dari Rp 207,32 triliun menjadi Rp 224,69 triliun, sementara transaksi ekonomi wisnas juga mengalami kenaikan sebesar 4,61 persen. Di sisi lain, promosi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, sementara investasi pariwisata mengalami kenaikan sebesar 2,41 persen.

Dari total nilai transaksi sebesar Rp 562,89 triliun pada tahun 2015, nilai transaksi yang diciptakan oleh konsumsi wisnus menyumbang 39,92 persen terhadap total nilai transaksi pariwisata, kemudian disusul oleh nilai transaksi yang diciptakan wisman yang mencapai Rp 175,71 triliun atau 31,22 persen. Sementara itu, kontribusi ketiga terbesar adalah dalam rangka investasi yang mencapai Rp 146,56 triliun atau 26,04 persen.

Dari hasil pencatatan konsumsi/transaksi tersebut ternyata kontribusi wisnus pada ekonomi pariwisata lebih besar dibanding wisman dan ini telah berlangsung sejak krisis ekonomi tahun 1998. Meskipun rata-rata pengeluaran wisnus per perjalanan lebih kecil daripada pengeluaran wisman, namun dari sisi jumlah kunjungan, jumlah perjalanan wisnus jauh lebih besar dari pada jumlah kunjungan wisman. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir kontribusi konsumsi wisnus cenderung menurun, sementara wisman cenderung meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini, antara lain melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat, pertumbuhan perjalanan wisnus yang relatif kecil, sementara kunjungan wisman terus tumbuh pesat, serta harga minyak dunia yang rendah sehingga dapat menekan biaya transportasi.

Tabel 4.3. Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia Tahun 2015 (miliar rupiah)

Sektor terkait Pariwisata	Pengeluaran Terkait Pariwisata									
	140'	14/2	Outbound			D	Jumlah			
	Wisman	Wisnus -	Pre-Trip	Post-Trip	Investasi	Promosi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Jasa Pariwisata										
Hotel dan Akomodasi	73 093,36	23 399,36	62,10	29,26			91 584,12			
Restoran dan sejenisnya	33 390,87	49 760,04	694,34	327,12			84 172,34			
Angkutan domestik	17 318,90	83 487,64	997,50	469,95			106 922,87			
Angkutan internasional	11 966,04	-	-	-			11 986,04			
Biro perjalanan,	4 208,84	4 837,98	1 336,36	629,60		l	10 484,99			
operator & pramuwisata						ı				
Jasa seni, budaya,	8 856,63	5 869,26	-	-			12 042,87			
rekreasi dan hiburan						ı				
Jasa pariwisata lainnya	1 211,25	4 312,68	-	-		'	5 523,94			
Souvenir	10 809,84	11 035,15	-	-			18 442,67			
Kesehatan dan	3 219,18	137,33	-	-			3 078,+06			
kecantikan										
Produk industri non	9 388,29	33 652,97	1 799,41	847,76			52 573,39			
makanan										
Produk pertanian	2 231,59	8 201,43	-	-		l	10 790,74			
Investasi Pariwisata										
Bangunan hotel dan					25 304,18		25 304,18			
akomodasi					25 504,10		25 504,10			
Bangunan restoran dan					9 400,15		9 400,15			
					3 400,13		3 400,13			
sejenisnya					30 513,72		30 513,72			
Bangunan bukan tempat					30 313,72		30 313,72			
tinggal					16 413,75		16 413,75			
Bangunan OR, rekreasi,					10 413,73		10 413,73			
hiburan,seni & budaya Infrastruktur					26 354,30		26 354,30			
					12 318,22		12 318,22			
Bangunan lainnya					•		•			
Mesin dan peralatan					9 145,37 9 452,33		9 145,37 9 452,33			
Alat angkutan										
Barang modal lainnya					7 656,18		7 656,18			
Pengeluaran Pemerintah						8 726,10	8 726,10			
Jumlah	175 714,78	224 693,84	4 889,71	2 303,69	146 558,19	8 726,10	562 886,31			

Ukuran kemajuan pariwisata Indonesia yang selama ini hanya menggunakan jumlah wisman yang datang ke Indonesia belum menggambarkan keutuhan kegiatan pariwisata. Dengan kata lain kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus kepada fluktuasi jumlah wisman sebenarnya kurang tepat sebab secara ekonomi peranan wisnus jauh lebih besar. Indikator perkembangan jumlah wisman tetap penting bagi Indonesia secara politis karena menyangkut aspek pencitraan serta keamanan dan kenyamanan bagi warga asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Selanjutnya untuk mengukur peranan ekonomi pariwisata atau dampak kegiatan pariwisata terhadap keseluruhan ekonomi nasional tahun 2015 dihitung dengan menggunakan multiplier input-output berdasarkan Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010. Aspek ekonomi yang diukur adalah peranan pariwisata dalam output nasional, produk domestik bruto (PDB) nasional, kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produksi neto baik keseluruhan maupun sektoral. Karena transaksi ekonomi pariwisata dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkonsumsi pariwisata secara independen (wisnus, wisnas, wisman, investor dan promosi) maka proses penghitungan dimungkinkan dilakukan secara parsial untuk masingmasing pihak tersebut.

Seperti diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, pengeluaran wisatawan (mancanegara, nusantara, dan nasional), investasi di bidang kepariwisataan, dan pengeluaran pemerintah untuk promosi pariwisata adalah bagian dari permintaan. Timbulnya pengeluaran-pengeluaran di sektor kepariwisataan tersebut akan berdampak positif pada penciptaan sejumlah variabel makro ekonomi, disamping dampak negatif seperti meningkatnya impor dan dampak non-ekonomi. Dengan menggunakan Tabel Input-Output, permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor dalam Tabel I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien pengganda Leontief.

Tabel 4.4. Dampak ekonomi Pariwisata, Tahun 2015

	Uraian	Output (triliun Rp)	PDB (triliun Rp)	Kompensasi TK (triliun Rp)	Pajak atas Produksi Neto (triliun Rp)
A.	Nilai Ekonomi Nasional	22 328,56	11 531,72	3 709,10	96,76
В.	Nilai Ekonomi Pariwisata	990,44	489,62	148,11	3,93
	1. Wisman	300,48	160,77	45,56	1,25
	2. Wisnus	389,15	192,32	57,12	1,58
	3. Wisnas	12,69	6,35	1,87	0,05
	4. Investasi	273,97	122,18	37,96	1,03
	5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	14,15	8,01	5,59	0,02
C.	Peranan Pariwisata (persen)	4,44	4,25	3,99	4,06
	1. Wisman	1,35	1,39	1,23	1,29
	2. Wisnus	1,74	1,67	1,54	1,63
	3. Wisnas	0,06	0,06	0,05	0,05
	4. Investasi	1,23	1,06	1,02	1,06
	5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	0,06	0,07	0,15	0,02

Tabel 4.4 menyajikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap sejumlah variabel ekonomi makro, yaitu output, produk domestik bruto (PDB), kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produksi neto pada tahun 2015. Apabila dibandingkan kondisi tahun 2014, terjadi kenaikan peran pariwisata pada seluruh sektor di tahun 2015 ini.

4.2.1. Dampak Terhadap Output

Output sektor produksi terbentuk karena permintaan domestik dan luar negeri. Untuk menghasilkan output komoditi sektor-sektor ekonomi tersebut diperlukan input antara (*intermediate input*) berupa bahan-bahan dan jasa untuk proses produksi termasuk jasa faktor produksi. Dorongan permintaan terhadap

produk barang dan jasa akan menciptakan perubahan nilai produksi. Permintaan atau pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), pre dan post trip wisatawan Indonesia ke luar negeri, investasi pemerintah dan swasta di sektor pariwisata, belanja pemerintah untuk pariwisata dan biaya promosi kepariwisataan akan berdampak pada penciptaan output di seluruh sektor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan secara ekonomi adalah dampak langsung berupa konsumsi barang dan jasa, serta dampak tak langsung berupa interaksi antar sektor yang terjadi akibat perubahan output barang dan jasa yang dikonsumsi.

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, peranan wisnus lebih besar dan lebih menentukan perkembangan pariwisata dibanding wisman. Persoalan turunnya jumlah wisman adalah karena perilaku wisman lebih sensitif terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan di negara yang dikunjungi. Dengan kondisi keamanan yang kurang menjamin (menurut pandangan mereka), maka dengan cepat jumlah wisman akan menurun. Kondisi ini dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Disamping menyajikan dampak secara total, Tabel 4.4 juga menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung atas setiap jenis pengeluaran wisatawan dan investasi. Berdasarkan Tabel Input Output tahun 2010, dengan struktur pengeluaran institusi kepariwisataan sebagaimana sub-bab terdahulu, diperoleh nilai output akibat adanya kegiatan pariwisata secara keseluruhan sebesar Rp 990,44 triliun yang tersebar di seluruh sektor ekonomi. Kontribusi nilai output akibat kegiatan pariwisata tersebut terhadap output/produksi nasional mencapai 4,47 persen. Dilihat menurut komponennya, dampak yang diciptakan akibat pengeluaran wisnus memberikan andil paling besar yaitu Rp 389,15 triliun atau 1,75 persen terhadap output nasional, diikuti konsumsi wisman Rp 300,48 triliun atau 1,35 persen terhadap output nasional.

Sementara investasi pariwisata memberikan dampak sebesar Rp 273,97 triliun atau 1,24 persen terhadap output nasional. Komponen lainnya adalah pre

dan post trip bagi wisatawan Indonesia ke luar negeri, meskipun dampak outputnya hanya sebesar Rp 12,69 triliun atau 0,06 persen dari output nasional, tetapi perlu mendapat perhatian karena nilainya yang cenderung meningkat setiap tahun. Biaya promosi dan pembinaan pariwisata berdampak pada penciptaan output yang hampir sama, yaitu sebesar Rp 14,15 triliun atau memiliki porsi 0,06 persen dari output nasional.

Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan peranan masing-masing pelaku pariwisata pada penciptaan output nasional: (1) perubahan dari besaran pengeluaran belanja itu sendiri, semakin besar pengeluaran semakin besar pula output yang dapat diciptakan, (2) pola pengeluarannya, artinya bila porsi pengeluaran lebih besar pada produk yang memiliki daya penyebaran besar, akan besar pula output yang tercipta di berbagai sektor.

4.2.2. Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara konsep, produk domestik bruto (PDB) merupakan bagian dari output, yaitu merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Besarnya PDB yang dihasilkan biasanya sejalan dengan nilai output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Demikian pula dengan permintaan produk pariwisata akan memberi perubahan pula pada besarnya PDB seluruh unit usaha.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap NTB mencapai Rp. 476,48 triliun dan pajak atas produk neto sebesar Rp. 13,14 triliun. Sehingga PDB yang tercipta akibat kegiatan pariwisata mencapai Rp. 489,62 triliun atau memberikan kontribusi

sebesar 4,25 persen dari total PDB nasional pada tahun 2015. Seperti halnya pada dampak terhadap output, dampak pariwisata pada PDB paling besar diciptakan oleh belanja wisnus dengan peran 1,67 persen dari PDB nasional. Hal ini memang sejalan dengan teori dimana PDB merupakan bagian dari output nasional. Sementara itu, dampak konsumsi wisman terhadap PDB sebesar 1,39 persen, investasi pemerintah dan swasta 1,06 persen, biaya promosi dan pembinaan 0,07 persen, serta pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri 0,06 persen. Potensi besar dari pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian nasional menjadi pendorong usaha-usaha non pariwisata untuk ikut mendukung kegiatan di bidang kepariwisataan.

4.2.3. Dampak Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja

Maraknya demo buruh akhir-akhir ini adalah karena tidak puasnya mereka terhadap upah yang diterima. Seperti diuraikan pada bahasan sebelumnya, adanya aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan menciptakan kompensasi tenaga kerja berupa balas jasa pekerja. Secara konsep kompensasi tenaga kerja adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja yang didasarkan pada latar belakang (background) pendidikan, kemampuan (skill), kompetensi pekerjaan maupun sektor usahanya. Dalam memproduksi barang dan jasa, faktor tenaga kerja merupakan bagian penting dari proses produksi disamping barang modal dan teknologi. Tingkat upah dapat pula mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional melalui konsumsi. Kompensasi tenaga kerja dalam model ini merupakan bagian dari nilai tambah berupa balas jasa faktor tenaga kerja.

Permintaan terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata berdampak pula terhadap permintaan upah dan gaji di setiap sektor ekonomi. Sesuai dengan asumsi linearitas pada model Input Output, perubahan upah dan gaji akan sejalan dengan perubahan nilai output yang dihasilkan. Pada Tabel 4.4

diperlihatkan peranan upah dan gaji dari kegiatan pariwisata terhadap nilai kompensasi tenaga kerja secara nasional, yang besarnya mencapai Rp 148,11 triliun atau 4,04 persen terhadap upah nasional. Sebagaimana dampak terhadap PDB, pengeluaran wisnus juga memberi dampak paling besar terhadap upah dan gaji yaitu 1,56 persen dari upah nasional, disusul konsumsi wisman yang berperan 1,24 persen. Investasi sektor pariwisata berdampak terhadap upah dan gaji pekerja di seluruh sektor ekonomi sebesar 1,03 persen dari upah nasional, sedangkan dampak yang diberikan promosi pariwisata serta pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri masing-masing hanya berperan 0,15 persen dan 0,05 persen.

4.2.4. Dampak Terhadap Pajak atas Produksi Neto

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dalam struktur Tabel I-O 2010 ada dua jenis pajak, yaitu pajak atas produksi neto sebagai bagian dari nilai tambah bruto (NTB) dan pajak atas produk neto. Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dikenakan dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas produksi, bukan merupakan pajak yang dibayar per unit output dan tak-dapat dikurangkan dari harga produsen. Pajak ini dicatat sebagai pajak yang dikeluarkan dari nilai tambah produsen atau sektor bersangkutan secara individu.

Tabel 4.4 menyajikan bahwa dampak kegiatan pariwisata terhadap pajak atas produksi neto. Tercatat bahwa pajak atas produksi neto yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp 3,93 triliun atau memberi sumbangan pada pajak atas produksi neto nasional sebesar 4,06 persen. Sumbangan terbesar diberikan oleh pengeluaran wisnus yang mencapai 1,63 persen, konsumsi wisman 1,29 persen, investasi pariwisata 1,06 persen, pengeluaran pre dan post trip dari

wisatawan Indonesia ke luar negeri dan pengeluaran promosi pariwisata masing-masing 0,05 persen dan 0,02 persen.

Untuk lebih jelasnya dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata pada tahun 2013 dapat dilihat pada diagram 4.1.

STRUKTUR **EKONOMI** Pengeluaran Wisman I-O (175,71)Multiplier **TABEL I-O 2010** matrix Pengeluaran Wisnus (224,69)Dampak terhadap 4,44 % Produksi Nasional produksi barang & jasa (22.328,56)(990,44)Investasi Sektor Pariwisata (146,56)Dampak terhadap 4,25 % PDB Indonesia PDB sektoral (11.531,72)(489,62)Pengeluaran Wisnas (pre+post) (7,19)Total Kompensasi Dampak terhadap 3,99 % TK Nasional kompensasi TK (3.709,10)(148,11)Pengeluaran Anggaran Pemerintah untuk Pariwisata

Dampak terhadap pajak

atas produksi neto (3,93)

Diagram 4.1. Dampak Ekonomi Pariwisata, Tahun 2015

(8,73)

Angka dalam triliun rupiah

Total Pajak

Nasional

(96,76)

4,06 %

BAB 5 TENAGA KERJA INDUSTRI PARIWISATA

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, selain harus diimbangi dengan jumlah sarana dan prasarana, juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Selain dipengaruhi jumlah fasilitas (sisi *supply*), kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja usaha yang melayani secara langsung terhadap permintaan wisatawan, seperti perhotelan, usaha objek daya tarik wisata, dan restoran. Tenaga kerja yang profesional sangat dibutuhkan karena sangat terkait dengan pelayanan terhadap wisatawan.

5.1. Industri Pariwisata

Pariwisata memiliki dimensi yang sangat luas. Usaha pariwisata tidak terbatas pada sektor usaha yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, tetapi juga mencakup berbagai sektor usaha lain yang pembinaannya di bawah kewenangan kementerian/lembaga lain.

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan jenis usaha pariwisata, maka pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata telah menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Bidang Pariwisata Indonesia. Klasifikasi tersebut merupakan sinkronisasi antara usaha pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta turunannya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Selain bermanfaat untuk pembinaan, klasifikasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam penyusunan data statistik terkait usaha pariwisata, antara lain mengetahui jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri-industri yang dikategorikan industri pariwisata.

Namun, mengingat luasnya cakupan usaha pariwisata, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, pembahasan tenaga kerja pada bagian ini hanya akan difokuskan pada tenaga kerja yang bekerja pada industri atau usaha yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata sebagai mana dijabarkan pada Lampiran X.

5.2. Tenaga Kerja Usaha Pariwisata

Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2015, pada Agustus 2015 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 10,36 juta orang atau 9,03 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 114,82 juta orang. Dari 10,36 juta orang, porsi terbesar (28,53 persen) merupakan mereka yang bestatus berusaha mandiri, sementara yang berstatus berusaha dibantu buruh dan karyawan/buruh sebesar 26,75 persen dan 25,72 persen. Untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar mencapai 17,47 persen.

Tabel 5.1. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2015

Status Pekerjaan	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. Berusaha sendiri	2 957 156	28,53
02. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	2 388 800	23,05
 Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar 	383 429	3,70
04. Buruh/karyawan	2 665 078	25,72
05. Pekerja bebas	158 518	1,53
06. Pekerja tak dibayar	1 810 676	17,47
Jumlah	10 363 657	100,00

Sumber: BPS, 2015

Menurut jenis kelamin, industri pariwisata didominasi oleh tenaga kerja perempuan (57,92 persen), sementara tenaga kerja laki-laki hanya sebesar 42,08 persen. Ini menunjukkan bahwa industri pariwisata menjadi lapangan usaha yang sangat potensial bagi perempuan di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Tabel 5.2. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Jenis Kelamin,
Tahun 2015

Jenis Kelamin	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. Laki-laki	4 360 938	42,08
02. Perempuan	6 002 719	57,92
Jumlah	10 363 657	100,00

Sumber: BPS, 2015

Sementara dilihat menurut kelompok umur, tenaga kerja pada industri pariwisata didominasi mereka yang berusia antara 25 tahun sampai dengan 54 tahun (70,16 persen), diikuti mereka yang berumur antara 15 tahun sampai dengan 24 tahun (14,32 persen). Yang menarik adalah tenaga kerja di atas 60 tahun lebih besar dari mereka yang berusia antara 55 tahun sampai dengan 59 tahun. Hal ini mengindikasikan industri pariwisata menjadi lapangan usaha yang cukup menjanjikan bagi para lansia di Indonesia.

Tabel 5.3. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Kelompok Umur,
Tahun 2015

Kelompok Umur	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. 15-24	1.483.978	14,32
02. 25-54	7.271.404	70,16
03. 55-59	702.938	6,78
04. 60+	905.337	8,74
Jumlah	10.363.657	100,00

Sumber: BPS, 2015

Apabila dilihat menurut pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja kerja industri pariwisata didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sampai SMP (59,39 persen). Hal ini menunjukkan pariwisata dapat menjadi salah satu

alternatif bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia karena secara umum bekerja pada industri pariwisata tidak memerlukan keahlian yang tinggi.

Tabel 5.4. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2015

Pendidikan	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. ≤ SMP	6 155 385	59,39
02. SMA	3 526 222	34,02
03. Diploma I/II/III	276 793	2,67
04. Universitas	405 257	3,91
Jumlah	10 363 657	100,00

Sumber: BPS, 2015

Dilihat menurut lapangan usaha sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 5.5, industri pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan yang masing-masing mempunyai share mencapai 44,90 persen dan 39,53 persen. Usaha lain yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan kegiatan olah raga dan rekreasi lainnya yang masing-masing menyumbang 5,57 persen dan 2,01 persen. Sementara kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas menyumbang 1,34 persen.

Tabel 5.5. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015

	Lapangan Usaha	Jumlah	Distribusi (%)
	(1)	(2)	(3)
01.	Perdagangan	4 096 641	39,53
02.	Angkutan darat	40 360	0,39
03.	Angkutan Air	5 648	0,05
04.	Angkutan Udara	761	0,01
05.	Penyediaan Akomodasi	577 278	5,57
06.	Penyediaan Makan minum	4 653 677	44,90
07.	Jasa Agen Perjalanan	70 382	0,68
08.	Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	139 071	1,34
09.	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	26 657	0,26
10.	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya	208 306	2,01
11.	Lainnya	544 876	5,26
	Jumlah	10 363 657	100,00

Sumber: BPS, 2015

5.2.1. Struktur Tenaga Kerja Perhotelan

Dilihat menurut jenis pekerjaan, berdasar data BPS pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja pada usaha akomodasi jangka pendek di Indonesia, baik di hotel berbintang maupun akomodasi lainnya, sebagian besar adalah tenaga teknis, diikuti penyelia dan tenaga administrasi.

Pada hotel berbintang sebagian besar bekerja sebagai pekerja teknis dan penyelia masing-masing sebesar 40,53 persen dan 12,03 persen dari total pekerja. Sementara itu untuk akomodasi lainnya, pekerja terbanyak sebagai tenaga kerja teknis (43,52 persen) dan administrasi (9,47 persen). Untuk pekerja lainnya seperti

tenaga pengamanan, juru taman dan *cleaning service* merupakan yang terbesar untuk kedua jenis akomodasi tersebut, karena memang mereka merupakan pelaksana langsung di lapangan.

Tabel 5.6. Distribusi Pekerja pada Usaha Akomodasi menurut Jenis Pekerjaan,
Tahun 2015 (Persen)

Jenis Pekerjaan	Hotel Bintang	Akomodasi Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Direktur	1,62	6,34	3,47
02. Manajer	5,02	7,02	5,80
03. Asisten Manajer	3,78	2,00	3,08
04. Penyelia	12,03	4,43	9,06
05. Teknis	40,53	43,52	41,70
06. Administrasi	8,16	9,47	8,67
07. Lainnya	28,85	27,21	28,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2015

Selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah tamu yang menginap di hotel, profesionalisme di bidang perhotelan mutlak diperlukan. Peningkatan mutu layanan hotel terus dilakukan, baik melalui pembinaan yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh para pengusaha hotel itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan kerja pada lembaga pendidikan khusus tenaga kejuruan hotel/pariwisata merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh. Pekerja berpendidikan kejuruan hotel/pariwisata relatif kecil bila dibandingkan dengan pekerja berpendidikan lainnya. Dari total pekerja yang bekerja pada usaha perhotelan, sebanyak 28,39 persen menyatakan tamat pendidikan kejuruan hotel/pariwisata, sedangkan sisanya (71,61 persen) tamat pendidikan non kejuruan pariwisata.

Dilihat menurut jenis kelamin, pada usaha akomodasi jumlah pekerja lakilaki lebih banyak dibanding jumlah pekerja perempuan. Tenaga kerja di usaha akomodasi sampai saat ini masih didominasi oleh pekerja laki-laki yaitu 72,60 persen di hotel bintang, sedangkan di usaha akomodasi lainnya mempunyai peran 67,01 persen dari total pekerja usaha akomodasi lainnya.

Sedangkan jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pekerja hotel berbintang terbanyak berpendidikan SMA yang mencapai 59,72 persen. Sementara untuk pekerja yang tamat pendidikan tinggi (universitas dan Diploma I/II/II) hanya sebesar 24,72 persen. Sementara untuk yang lulusan universitas hanya sebesar 11,37 persen.

Tabel 5.7. Struktur Pekerja pada Usaha Hotel Berbintang menurut Tingkat
Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 (Persen)

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. ≤ SMP	4,61	3,10	4,19
02. SMA	61,85	54,07	59,72
03. Diploma I/II/III	23,74	27,31	24,72
04. Universitas	9,81	15,52	11,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Distribusi	72,60	27,40	100,00

Sumber: BPS, 2015

Sedikit berbeda dengan struktur tenaga kerja di hotel berbintang, pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya, tenaga kerja berpendidikan sampai dengan SMP masih cukup besar porsinya, baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, yaitu masing-masing 20,61 persen dan 24,75 persen, sedangkan yang berpendidikan Diploma I/II/III dan Sarjana masih sangat sedikit jumlahnya. Tenaga

kerja di usaha akomodasi lainnya juga masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SMA.

Tabel 5.8. Struktur Pekerja pada Usaha Akomodasi Lainnya Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 (Persen)

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. ≤ SMP	20,61	24,75	21,98
02. SMA	65,99	59,05	63,70
03. Diploma I/II/III	6,75	7,80	7,10
04. Universitas	6,65	8,40	7,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Distribusi	67,01	32,99	100,00

Sumber: BPS, 2015

5.2.2. Struktur Tenaga Kerja Usaha Restoran/Rumah Makan

Jenis usaha lain yang juga terkait erat dengan kegiatan pariwisata adalah usaha restoran/rumah makan. Di dalam melakukan perjalanan, seseorang pasti akan membutuhkan konsumsi untuk menunjang perjalanannya. Kebutuhan wisatawan tersebut dapat dipenuhi, salah satunya oleh usaha penyediaan makan minum yaitu usaha restoran/rumah makan. BPS secara rutin melakukan pendataan usaha restoran/rumah makan setiap tahun melalui Survei Usaha Restoran/Rumah Makan (VREST). Namun usaha restoran/rumah makan yang dicakup dalam survei ini hanya usaha yang berskala menengah dan besar.

Berdasar survei tersebut, pada Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang terserap pada usaha restoran/rumah makan sebagian besar adalah pekerja berkewarganegaraan Indonesia. Pekerja asing pada usaha restoran/rumah makan

relatuf kecil yaitu hanya 0,15 persen dari seluruh pekerja. Indikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga asing, dengan kata lain dalam mengoperasikan kedua jenis usaha ini, tenaga kerja Indonesia sangat mampu. Sementara bila dilihat menurut status pekerja Indonesia, sebagian besar berstatus sebagai pekerja tetap (74,43 persen), sementara yang berstatus sebagai pekerja tidak tetap dan tidak dibayar masing-masing sebesar 24,56 persen dan 0,86 persen.

Tabel 5.9. Persentase Pekerja pada Usaha Restoran/Rumah Makan Menurut Kewarganegaraan dan Status Pekerja, Tahun 2015 (Persen)

Status Pekerja	Distribusi
(1)	(2)
01. WNI	99,85
a. Tetap	74,43
b. Tidak Tetap	24,56
c. Tidak Dibayar	0,86
02. WNA	0,15
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, 2016

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pekerja, seperti halnya pada usaha penyedia jasa akomodasi, sebagian besar pekerja pada usaha restoran/rumah makan adalah berpendidikan SMA dan sederajat, baik untuk pekerja laki-laki maupun perempuan, dimana masing-masing sebesar 78,98 persen dan 78,01 persen. Sementara untuk pekerja dengan pendidikan sarjana relatif kecil, yaitu hanya 4,04 persen untuk pekerja laki-laki dan 4,17 persen untuk pekerja perempuan.

83

Tabel 5.10. Persentase Pekerja pada Usaha Restoran/rumah makan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015 (Persen)

Laki-laki	Perempuan
(2)	(3)
10,50	10,65
78,98	78,01
6,47	7,17
4,04	4,17
100,00	100,00
	10,50 78,98 6,47 4,04

Sumber: BPS, 2016

5.2.3. Struktur Tenaga Kerja Usaha SPA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa salah satu hasil yang diharapkan dari penyusunan Nesparnas tahun 2016 adalah tersedianya data mengenai tenaga kerja pada industri pariwisata terkait. Melalui Survei Usaha SPA, diperoleh data ketenagakerjaan terkait kegiatan usaha *Solus Per Aqua* (SPA). Sebagaimana Survei Restoran/Rumah Makan, cakupan survei untuk usaha SPA yang dilakukan BPS hanya untuk usaha SPA yang berskala menengah dan besar.

Dari survei tersebut seperti pada Table 5.11, dapat dilihat bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terserap pada usaha SPA berskala menengah dan besar di Indonesia berkewarganegaraan Indonesia (99,87 persen), sementara pekerja asing yang bekerja pada usaha SPA di Indonesia relatif kecil yang hanya 0,13 persen. Ditinjau berdasarkan status pekerja, sebagian besar pekerja merupakan pekerja tetap (68,55 persen), sedangkan yang berstatus sebagai pekerja tidak tetap dan tidak dibayar masing-masing sebesar 28,23 persen dan 3,09 persen.

Tabel 5.11. Persentase Pekerja pada Usaha SPA Menurut Kewarganegaraan dan Status Pekerja, Tahun 2015 (Persen)

Status Pekerja	Distribusi
(1)	(2)
01. WNI	99,87
a. Tetap	68,55
b. Tidak Tetap	28,23
c. Tidak Dibayar	3,09
02. WNA	0,13
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, 2016

Pendidikan maupun keahlian dari seorang pekerja sangat diperlukan untuk menempati jenjang maupun posisi suatu pekerjaan. Pada tabel 5.12 dapat dilihat tingkat pendidikan dari pekerja pada usaha SPA. Dari hasil Survei SPA, diketahui bahwa sebagian besar pekerja pada usaha SPA berpendidikan SMA, yaitu mencapai 78,72 persen. Sementara itu, pekerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi masih sedikit jumlahnya, dan biasanya mereka menempati posisi-posisi puncak.

Tabel. 5.12. Persentase Pekerja WNI pada Usaha SPA Menurut Pendidikan, Tahun 2015

Pendidikan	Distribusi
(1)	(2)
01. ≤ SMP	11,51
02. SMA	78,72
03. Diploma I/II/III	5,12
04. Universitas	4,65
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, 2016

BAB 6

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA DUNIA

Nesparnas (Buku 1)

Indonesia dalam Perspektif Pariwisata Dunia

Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2015 mencapai 1.186 juta kunjungan atau naik sebesar 4,6 persen dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 1.134 juta kunjungan. Seluruh destinasi pariwisata memberikan hasil yang positif, kecuali Afrika. Kawasan Amerika mengalami pertumbuhan yang paling cepat dibanding kawasan lainnya, yaitu mencapai 5,9 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 juga dialami negaranegara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa yang masing-masing tumbuh sebesar 5,6 persen dan 4,7 persen. Kawasan Timur Tengah mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen, sementara negara-negara di kawasan Afrika mengalami penurunan sebesar 3,3 persen.

Sejalan dengan kenaikan kunjungan wisatawan internasional di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Pasifik, pada tahun yang sama kunjungan wisman ke Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 10,29 persen. Pertumbuhan tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan Asia Tenggara.

Ditinjau menurut penyebaran, dari seluruh kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2015, Eropa masih merupakan kawasan yang terbanyak menerima kunjungan yaitu 51,2 persen dari total kunjungan, mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang tercatat 51,4 persen. Asia Pasifik (selain Indonesia) menerima kunjungan sebanyak 22,6 persen dan Amerika 16,2 persen dari total wisatawan internasional. Sementara itu kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,4 juta kunjungan atau 0,9 persen dari total kunjungan dunia. Masih kecilnya porsi kunjungan wisman di Indonesia merupakan faktor yang harus diperhatikan pemerintah terutama dalam hal penyusunan kebijakan, pengembangan, dan promosi pariwisata yang lebih fokus, intensif dan ekstensif, serta efisien, dengan tetap memperhatikan kondisi politik dan keamanan. Sementara itu kawasan Timur Tengah dan Afrika merupakan kawasan dengan

Nesparnas (Buku 1) 87

kunjungan wisatawan terendah yang masing-masing sebesar 4,5 persen dari total kunjungan dunia.

Tabel 6.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Dunia Tahun 2014 dan 2015 (juta orang)

Vaunaan	Jumlah kun	ijungan	Perubahan	Share 2015	
Kawasan	2015	2014	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Afrika	53,5	55,3	-3,3	4,5	
Amerika	192,6	181,9	5,9	16,2	
Asia Pasifik (tanpa Indonesia)	268,8	254,9	5,5	22,6	
Eropa	607,7	580,2	4,7	51,2	
Timur Tengah	53,3	52,4	1,7	4,5	
Indonesia	10,4	9,4	10,3	0,9	
Jumlah	1 186,3	1 134,1	4,6	100,00	

Sumber: Tourism Highlights, 2016 edition, UNWTO

Di sisi lain, kedatangan wisman ke suatu negara tentu menghasilkan devisa bagi negara yang dikunjungi. Pengeluaran wisman untuk akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan dan lainnya merupakan pilar ekonomi yang penting dari negara tujuan wisata sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan.

Dari hasil pendataan UNWTO, diperoleh bahwa rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan pada tahun 2015 mencapai US\$ 1.060. Amerika dan Asia Pasifik menikmati rata-rata pengeluaran per kunjungan yang tertinggi yaitu masing-masing sebesar US\$ 1.580 dan US\$ 1.500, diikuti Timur Tengah dan Eropa yaitu US\$ 1.020 dan US\$ 740. Sementara rata-rata pengeluaran per kunjungan ke Afrika sebesar US\$ 620. Namun demikian, dari sisi total devisa/penerimaan, kawasan Eropa merupakan penerima devisa tertinggi yaitu US\$ 450,7 miliar. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kunjungan di kawasan ini dibanding kawasan

lainnya. Pada tahun 2015, penerimaan seluruh negara dari kegiatan pariwisata mengalami peningkatan sehingga mencapai US\$ 1.260 miliar atau turun sebesar 3,7 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai US\$ 1.309 miliar.

Tabel 6.2. Jumlah Penerimaan dari Wisman Dunia Tahun 2014 dan 2015

Kawasan	Devisa (miliar US\$)		Perubahan	Perubahan (%)	Share
Kawasaii	2015	2014	(%)	(mata uang lokal, konstan)	2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Afrika	33,1	36,1	-8,3	2,4	2,6
Amerika	303,7	288,0	5,5	7,8	24,1
Asia Pasifik (tanpa Indonesia)	406,1	408,9	-0,7	4,0	32,2
Eropa	450,7	513,5	-12,2	3,0	35,8
Timur Tengah	54,4	51,6	5,4	4,3	4,3
Indonesia	12,2	11,2	8,9		1,0
Total	1 260,2	1 309,3	-3,1	4,4	100,00

Sumber: Tourism Highlights, 2016 edition, UNWTO

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa dalam dolar Amerika Serikat sebagian besar kawasan mengalami penurunan penerimaan devisa dari pariwisata kecuali Amerika dan Timur Tengah yang mengalami kenaikan penerimaan devisa masing-masing sebesar sebesar 5,5 persen dan 5,4 persen. Penerimaan devisa di Indonesia juga mengalami kenaikan sebesar 8,9 persen. Namun jika dilihat berdasar nilai konstan, semua kawasan menunjukkan nilai yang positif dengan peningkatan terbesar untuk kawasan Amerika yang mencapai 7,8 persen.

Jika dilihat menurut negara tujuan wisata utama, berdasarkan dua komponen utama, yaitu jumlah kunjungan dan penerimaan devisa, delapan negara masuk dalam daftar keduanya. Untuk sepuluh negara besar penerima kunjungan wisatawan, tidak banyak pergeseran posisi. Perubahan yang terjadi hanya

Nesparnas (Buku 1)

perubahan posisi sembilan, dimana pada 2015 Meksiko naik ke peringkat ke-9 dari posisi ke-10 menggeser Rusia. Sementara dalam hal penerimaan devisa juga terjadi sedikit perubahan. Thailand naik dari peringkat 9 ke peringkat 6 dan Hongkong naik satu tingkat ke peringkat 9 sebagai negara penerima devisa terbesar di dunia.

Prancis tetap menduduki urutan pertama dalam hal kunjungan wisatawan internasional. Meksiko, yang menduduki peringkat ke-9 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di 2015, yaitu sebesar 9,4 persen. Untuk negara-negara besar lainnya masih tetap menduduki posisi yang sama dengan tahun lalu dengan pertumbuhan yang bervariasi.

Tabel 6.3. Sepuluh Negara Tujuan Wisata Utama di Dunia Tahun 2014 dan 2015

Wisman (j	Dorubahan (9/)	
2015	2014	— Perubahan (%)
(2)	(3)	(4)
84,5	83,7	0,9
77,5	75,0	3,3
68,2	64,9	5,0
56,9	55,6	2,3
50,7	48,6	4,4
39,5	39,8	-0,8
35,0	33,0	6,0
34,4	32,6	5,6
32,1	29,3	9,4
31,3	29,8	5,0
	2015 (2) 84,5 77,5 68,2 56,9 50,7 39,5 35,0 34,4 32,1	(2) (3) 84,5 83,7 77,5 75,0 68,2 64,9 56,9 55,6 50,7 48,6 39,5 39,8 35,0 33,0 34,4 32,6 32,1 29,3

Sumber: Tourism Highlights, 2016 edition, UNWTO

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu negara belum menjamin besarnya devisa yang diterima negara tersebut dari kedatangan wisatawan. Hal ini terlihat dari negara penerima devisa terbesar dari wisatawan dunia adalah Amerika Serikat dengan jumlah penerimaan sebesar US\$ 204,5 miliar atau 16,23 persen dari

seluruh penerimaan devisa pariwisata dunia, dimana dalam hal kunjungan Amerika Serikat menempati urutan kedua.

Tabel 6.4. Sepuluh Negara Penghasil Devisa Utama di Dunia Tahun 2014 dan 2015

Negara	Devisa (milia	r US\$)	Damila la a (0/)	
_	2015	2014	Perubahan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Amerika	204,5	191,3	6,9	
2. Tiongkok	114,1	105,4	8,3	
3. Spanyol	56,5	65,1	-13,2	
4. Perancis	45,9	58,1	-21,0	
5. Inggris	45,5	46,5	-2,3	
6. Thailand	44,6	38,4	16,0	
7. Italia	39,4	45,5	-13,3	
8. Jerman	36,9	43,3	-14,9	
9. Hongkong	36,2	38,4	-5,8	
10. Macau	31,3	42,6	-26,4	

Sumber: Tourism Highlights, 2016 edition, UNWTO

Sedangkan Perancis sebagai negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan, hanya berada di urutan keempat dengan penerimaan devisa sebesar US\$ 45,9 miliar atau 3,64 persen dari seluruh devisa wisatawan, dan juga nilai tersebut menunjukkan penurunan 22,0 persen dibanding tahun lalu. Begitu pula dengan negara Turki yang menduduki peringkat 6 dan Rusia pada peringkat 10 dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional, namun dalam penerimaan devisa tidak masuk dalam 10 besar. Sebaliknya Hongkong dan Macao yang tidak masuk dalam 10 besar negara penerima wisatawan internasional, menduduki peringkat 9 dan 10 dalam hal penghasil devisa.

Nesparnas (Buku 1)

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik,	Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output, Jakarta,
November	2008
, Desember	<u>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,</u> Jakarta, 2009
2016	Statistik Kunjungan Tamu Asing 2015 , Jakarta, Agustus
2016	<u>Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2015</u> , Jakarta, Agustus
, Jakarta, No	<u>Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2015</u> , ovember 2015
2015	Statistik Angkatan Kerja Nasional 2015, Jakarta, Agustus
2015	Tabel Input Output Indonesia 2010, Jakarta, Desember
2016	Statistik Restoran/Rumah Makan 2015, Jakarta, Desember
	Statistik SPA 2015, Jakarta, Desember 2016
•	a, Seni dan Budaya, <u>Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata</u> (<u>KLUPI) 1999</u> , Jakarta, Desember 1999
Kementerian Pariwisat Desember	a, <u>Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara 2015</u> , Jakarta, 2015
International Monetary	y Fund, <u>Balance of Payments and International Investment</u>
Posisition	Sixth Ed. (BPM6), Draft, September 2007

United Nations and World Tourism Organization, International Recommendations
for Tourism Statistics, 2008, Madrid, New York, 2008
, <u>UNWTO Tourism</u>
Highlights 2016 Edition, Madrid, New York, 2016
United Nations, World Tourism Organization and OECD, 2008 Tourism Satellite
Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008),
Madrid, New York, 2008
United Nations, European Commission, IMF, and WTO, Manual on Statistics of
International Trade in Services, New York, 2002
United Nations, Central Product Classification Ver.2, New York, 2006
International Standard Industrial Classification of All
, <u>International Standard Industrial Classification of All</u>
Economic Activities Rev.4, New York, March 2006
, System of National Accounts 1993. Prepared by ISWGNA
(Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank), Washington DC, 1993.
World Travel and Tourism Council, <u>Update Principles for Travel and Tourism</u>
National Satellite Account, September 1998,

LAMPIRAN

Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal Terbesar dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2015 (miliar rupiah)

===		Negara Asal					
	Jenis Produk	Singapura	Malaysia	Tiongkok	Australia	Jepang	Korea Selatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	6 468,04	6 018,68	7 921,01	10 661,68	4 090,92	2 636,69
2.	Restoran dan sejenisnya	2 773,24	2 703,42	3 506,68	5 206,45	1 640,04	1 245,83
3.	Angkutan domestik	1 467,60	1 476,99	1 773,76	1 868,65	855,34	619,24
4.	Angkutan internasional	851,23	638,48	1 617,47	2 830,50	980,72	641,87
5.	Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	404,77	315,27	558,14	821,10	270,94	154,06
6.	Jasa seni budaya, rekreasi, & hiburan	641,12	608,49	679,79	1 019,14	245,66	202,20
7.	Jasa pariwisata lainnya	281,89	160,13	94,32	179,92	35,31	19,99
8.	Souvenir	258,82	384,59	762,89	441,19	242,90	220,71
9.	Kesehatan dan kecantikan	288,27	266,54	337,73	739,04	147,64	107,82
10.	Produk industri non makanan	1 396,77	1 559,61	1 802,00	2 308,01	687,25	597,84
11.	Produk pertanian	346,70	375,10	447,65	552,93	164,88	148,41
	Total pengeluaran	15 178,46	14 507,30	19 501,44	26 628,62	9 361,58	6 594,64
a.	Jumlah wisatawan	1 624 058	1 458 593	1 260 700	1 099 058	549 705	387 473
b.	Lama Tinggal (hari)	4,30	5,11	6,58	10,33	6,27	7,32
c.	Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 rupiah)	9 346,01	9 946,09	15 468,74	24 228,58	17 030,19	17 019,62

Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal terbesar dan Produk

Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2015 (miliar rupiah)

Lanjutan

		Negara Asal					
	Jenis Produk	India Inggris Amerika Fili Serikat				Lainnya	Jumlah
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	2 347,73	2 879,57	2 704,42	1 381,01	25 983,61	73.093,36
2.	Restoran dan sejenisnya	919,63	1 389,51	1 198,98	537,27	12 269,79	33.390,83
3.	Angkutan domestik	503,68	678,50	734,98	306,83	11 682,21	21.967,78
4.	Angkutan internasional	255,61	559,57	414,52	154,00	3 042,07	11.986,04
5.	Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	73,32	298,24	285,85	67,54	431,84	3.681,05
6.	Jasa seni budaya, rekreasi, & hiburan	219,65	315,80	270,61	116,76	854,39	5.173,61
7.	Jasa pariwisata lainnya	27,61	36,86	49,03	24,39	301,80	1.211,25
8.	Cenderamata	132,42	110,58	146,22	63,82	643,38	3.407,51
9.	Kesehatan dan kecantikan	77,04	87,09	86,20	41,10	762,28	2.940,73
10.	Produk industri non makanan	428,39	467,59	411,16	294,65	6 319,97	16.273,25
11.	Produk pertanian	102,88	114,76	100,17	71,64	164,20	2.589,32
	Total pengeluaran	5 087,96	6 938,06	6 402,14	3 059,01	62 455,54	175.714,74
a.	Jumlah wisatawan	319 608	292 745	276 027	273 630	2 865 162	10 406 759
b.	Lama Tinggal (hari)	6,83	13,21	11,42	5,97	10,01	8,53
С.	Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 rupiah)	15 919,39	23 700,01	23 193,88	11 179,35	21 798,26	16 884,67

Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Jenis Pengeluaran Tahun 2015 (miliar rupiah)

	lonic Pongolyayan	Provinsi Asal Jenis Pengeluaran					
	Jenis Pengeluaran	Sumut	Sumbar	DKI	Jabar	Jateng	DI Yogya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	398,08	332,70	2 758,18	3 830,88	893,10	405,73
2.	Restoran dan sejenisnya	1 173,90	963,09	4 362,13	8 666,82	3 513,30	1 139,74
3.	Angkutan domestik	1 862,26	1 454,54	6 573,99	9 881,71	4 199,27	1 537,40
4.	Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	14,04	8,22	94,34	268,03	130,98	23,97
5.	Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	145,02	96,08	860,52	1 813,66	533,21	186,31
6.	Jasa pariwisata lainnya	5,97	44,93	277,24	1 109,89	960,11	232,00
7.	Cenderamata	504,11	177,02	1 306,13	1 609,15	819,15	311,68
8.	Kesehatan dan kecantikan	5,78	2,57	6,24	15,02	13,83	17,65
9.	Produk industri non makanan	719,46	627,60	2 801,20	5 479,63	2 938,43	473,40
10.	Produk pertanian	130,31	99,67	709,38	967,88	306,19	56,41
	Total Pengeluaran	4 958,92	3 806,42	19 749,36	33 642,67	14 307,58	4 384,29
a.	Jumlah perjalanan	9 464 756	5 022 693	24 134 824	44 397.263	38 976 233	6 331 609
b.	Rata-rata pengeluaran per perjalanan(000 rupiah)	523,93	757,84	818,29	757,76	367,08	692,45

Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Jenis Pengeluaran Tahun 2015 (miliar rupiah)

Lanjutan

99

	Jenis Pengeluaran		Provinsi Asal				
	Jenis i engendaran	Jatim	Bali	Sulut	Sulsel	Lainnya	Jumlah
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	1 472,65	288,02	600,35	668,33	11 751,32	23 399,36
2.	Restoran dan sejenisnya	4 612,16	1 326,11	744,15	1 585,98	21 672,68	49 760,04
3.	Angkutan domestik	5 629,25	1 747,15	1 590,90	2 544,64	46 466,53	83 487,64
4.	Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	112,07	14,77	1,86	12,54	4 157,17	4 837,98
5.	Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	884,45	121,39	78,62	135,50	1 014,52	5 869,26
6.	Jasa pariwisata lainnya	978,47	319,97	115,05	156,16	112,88	4 312,68
7.	Cenderamata	934,19	254,22	77,88	202,84	4 838,79	11 035,15
8.	Kesehatan dan kecantikan	9,23	10,25	23,41	14,68	18,68	137,33
9.	Produk industri non makanan	3 881,21	716,10	838,38	1 785,75	13 391,81	33 652,97
10.	Produk pertanian	652,58	52,09	156,09	176,06	4 894,76	8 201,43
	Total Pengeluaran	19 166,25	4 850,07	4 226,68	7 282,47	108 319,15	224 693,84
a.	Jumlah perjalanan	40 738 635	8 316 585	2 635 068	8 595 079	67 806 261	256 419 006
b.	Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 rupiah)	470,47	583,18	1 604,01	847,28	1 597,48	876,28

Tabel 2.b. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Jenis Pengeluaran Tahun 2015 (miliar rupiah)

	Jenis Pengeluaran	Provinsi Tujuan					
	Jeins Fengeluaran	Sumut	Sumbar	DKI	Jabar	Jateng	Yogya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	432,95	159,60	10.291,14	3.723,55	1.231,06	1.056,51
2.	Restoran dan sejenisnya	1.450,28	630,48	13.090,26	8.630,66	4.778,29	2.281,88
3.	Angkutan domestik	2.065,91	762,66	24.291,42	11.600,88	7.760,56	3.921,57
4.	Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	12,51	8,25	299,77	252,09	135,43	77,77
5.	Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	147,68	65,87	1.447,58	1.180,44	527,78	379,28
6.	Jasa pariwisata lainnya	14,93	12,64	898,78	952,69	457,46	389,43
7.	Cenderamata	437,37	113,96	1.593,41	1.668,39	1.028,88	959,02
8.	Kesehatan dan kecantikan	6,93	1,78	26,26	5,26	1,99	3,18
9.	Produk industri non makanan	1.153,08	473,46	6.387,09	5.401,05	3.312,40	1.804,72
10.	Produk pertanian	340,17	70,41	1.371,24	1.092,03	702,34	328,66
	Total Pengeluaran	6.061,80	2.299,12	59.696,95	34.507,04	19.936,19	11.202,01
a.	Jumlah perjalanan	9.514.677	4.811.419	25.141.647	48.859.076	33.969.691	12.655.216
b.	Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 rupiah)	637,10	477,85	2.374,42	706,26	586,88	885,17

Tabel 2.b. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Jenis Pengeluaran Tahun 2015 (miliar rupiah)

Lanjutan

	Provinsi Tujuan Jenis Pengeluaran						Jumlah
Jenis Pengeluaran		Jatim	Bali	Sulut	Sulsel	Lainnya	Juilliali
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	2 157,47	1 057,94	202,20	701,24	2 385,69	23 399,36
2.	Restoran dan sejenisnya	6 360,19	1 592,25	471,59	2 559,78	7 914,37	49 760,04
3.	Angkutan domestik	10 919,96	2 720,34	802,32	3 988,88	14 653,15	83 487,64
4.	Biro perjalanan, operator & pramuwisata	143,81	39,80	12,72	30,37	3 825,47	4 837,98
5.	Jasa seni budaya, rekreasi & hiburan	892,14	251,08	39,58	152,17	785,66	5 869,20
6.	Jasa pariwisata lainnya	750,75	524,45	11,03	30,97	269,54	4 312,68
7.	Cenderamata	1 509,65	410,83	44,64	324,81	2 944,20	11 035,1
8.	Kesehatan dan kecantikan	6,76	4,61	4,11	7,76	68,69	137,33
9.	Produk industri non makanan	4 627,15	1 127,86	558,62	2 549,60	6 257,94	33 652,97
10.	Produk pertanian	927,89	204,48	117,91	548,60	2 497,70	8 201,43
	Total Pengeluaran	28 295,77	7 933,64	2 264,73	10 894,19	41 602,41	224 693,84
a.	Jumlah perjalanan	42 646 168	8 770 551	2 149 636	9 502 859	58 398 066	256 419 006
b.	Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 rupiah)	663,50	904,58	1 053,54	1 146,41	712,39	851,68

Tabel 3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia yang ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2015 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Pre-Trip	Trip	Post-Trip	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Hotel dan akomodasi lainnya	62,10	31 774,02	29,26	31 865,37
2. Restoran dan sejenisnya	694,34	14 431,41	327,12	15 452,87
3. Angkutan	997,50	6 458,00	469,95	7 925,46
Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	1 336,36	1 025,07	629,60	2 991,03
5. Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan	-	2 446,67	-	2 446,67
6. Jasa Par, Lainnya	-	3 670,01	-	3 670,01
7. Cenderamata	-	7 300,56	-	7 300,56
8. Kesehatan dan kecantikan	-	9 722,73	-	9 722,73
9. Produk non makanan	1 799,41	19 634,87	847,76	22 282,04
10. Produk pertanian	-	1 227,15	-	1 227,15
Total Pengeluaran	4 889,71	97 690,51	2 303,69	104 883,90
a. Jumlah wisatawan	8 176 162	8 176 162	8 176 162	
b. Lama Tinggal (hari)	-	6,49	-	
c. Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 rupiah)	598,04	11 948,21	281,76	

Tabel 4. Struktur Pengeluaran Wisatawan Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi dan Jenis Wisatawan Tahun 2015 (miliar rupiah)

	Jenis Pengeluaran	Wisman	Wisnus	Outb	ound	Jumlah
			wisiius -	Pre Trip	Post Trip	Juilliali
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hotel dan akomodasi lainnya	68 093,40	23 399,36	62,10	29,26	91 584,12
2.	Restoran dan sejenisnya	33 390,83	49 760,04	694,34	327,12	84 172,34
3.	Angkutan domestik	21 967,78	83 487,64	997,50	469,95	106 922,87
4.	Angkutan internasional	11 986,04	-	-	-	11 986,04
5.	Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	3 681,05	4 837,98	1 336,36	629,60	10 484,99
6.	Seni, budaya, rekreasi, & hiburan	6 173,61	5 869,26	-	-	12 042,87
7.	Jasa pariwisata lainnya	1 211,25	4 312,68	-	-	5 523,94
8.	Cenderamata	7 407,51	11 035,15	-	-	18 442,67
9.	Kesehatan dan kecantikan	2 940,73	137,33	-	-	3 078,06
10.	Produk industri bukan makanan	16 273,25	33 652,97	1 799,41	847,76	52 573,39
11.	Produk Pertanian	2 589,32	8 201,43	-	-	10.790,74
	Total Pengeluaran	175 714,78	224 693,84	4 889,71	2 303,69	407 602,02
a.	Jumlah Perjalanan / kunjungan	10 406 759	256 419 006	8 176 162	8 176 162	
b.	Rata-rata Lama Tinggal/ bepergian (hari)	8,53	-	-	-	
C.	Rata-rata Pengeluaran per kunjungan/perjalanan (000 rp)	16 884,68	876,28	598,04	281,76	

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (Persen)

	Sektor Pariwisata					
Struktur Input	Penyediaan akomodasi	Penyediaan Makan Minum	Angkutan Rel	Angkutan Darat selain Rel	Angkutan Air	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I. Input Antara	38,00	55,96	62,17	45,50	67,09	
1. Pertanian	8,87	15,09	0,11	-	0,12	
2. Pertambangan	0,01	-	0,03	-	-	
3. Industri	19,36	27,47	19,91	29,77	33,01	
4. Listrik, gas dan air	1,22	0,36	6,88	0,34	0,68	
5. Bangunan	0,70	0,07	6,20	0,55	3,21	
6. Perdagangan	3,54	11,47	2,63	8,06	2,25	
7. Angkutan	0,28	0,20	2,13	2,90	15,30	
8. Penyediaan akomodasi	0,05	0,02	0,55	0,02	0,20	
9. Penyediaan makan minum	0,17	0,00	0,10	0,04	0,17	
10. Komunikasi	1,16	0,41	0,38	0,44	1,42	
11. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	2,31	0,61	3,68	3,08	9,96	
12. Jasa-jasa	0,33	0,25	19,57	0,30	0,77	
II. Input Primer	62,00	44,04	37,83	54,50	32,91	
1. Kompensasi TK	16,24	16,28	29,89	17,91	10,15	
2. Surplus usaha	45,32	27,42	7,64	36,17	22,50	
3. Pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi	0,44	0,35	0,30	0,42	0,26	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (Persen)

Lanjutan

	Sektor Pariwisata					
Struktur Input	Angkutan Udara	Jasa Penunjang Angkutan	Lemb Keu dan Jasa Perusahaan	Jasa hib., rek. & budaya		
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I. Input Antara	49,10	39,16	41,55	62,17		
1. Pertanian	0,47	0,00	0,01	0,11		
2. Pertambangan	-	0,16	0,37	0,03		
3. Industri	13,09	2,16	9,13	19,91		
4. Listrik, gas dan air	0,08	1,81	0,88	6,88		
5. Bangunan	0,04	9,33	6,88	6,20		
6. Perdagangan	2,34	1,04	1,33	2,63		
7. Angkutan	13,97	14,43	2,34	2,13		
8. Penyediaan akomodasi	0,02	0,11	0,05	0,55		
9. Penyediaan makan minum	5,76	0,07	0,06	0,10		
10. Komunikasi	3,96	5,00	3,83	0,38		
11. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	8,89	4,54	14,63	3,68		
12. Jasa-jasa	0,47	0,49	2,06	19,57		
II. Input Primer	50,90	60,84	58,45	37,83		
1. Kompensasi TK	20,73	22,22	17,87	29,89		
2. Surplus usaha	29,76	38,14	40,24	7,64		
3. Pajak dikurangi subsidi lainnya atas produksi	0,40	0,48	0,33	0,30		
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00		

Tabel 6. Struktur PMTB Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun Tidak Langsung Tahun 2015 (miliar rupiah)

		Penanam Modal				
	Jenis Barang Modal	Swasta/	Pemerintah			
		BUMN/ BUMD	Pusat	Daerah	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Bangunan Hotel & Akomodasi lainnya	25 304,18	-	-	25 304,18	
2.	Bangunan Restoran & sejenisnya	9 400,15	-	-	9 400,15	
3.	Bangunan Bukan Tempat Tinggal	30 500,98	6,63	6,11	30 513,72	
4.	Bangunan olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya	16 383,92	15,44	14,39	16 413,75	
5.	Infrastuktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan)	26 330,89	13,10	10,31	26 354,30	
6.	Bangunan Lainnya	12 318,22	-	-	12 318,22	
7.	Mesin dan Peralatan	8 911,83	130,65	102,89	9 145,37	
8.	Alat Angkutan	9 360,71	40,89	50,73	9 452,33	
9.	Barang modal Lainnya	7 651,42	1,71	3,05	7 656,18	
	Jumlah	146 162,29	208,43	187,47	146 558,19	

Tabel 7. Struktur Pekerja yang Terlibat dalam Industri Pariwisata Tahun 2015

	Sektor	Banyaknya (orang)	Distribusi (Persen)
	(1)	(2)	(3)
1.	Perdagangan	4 096 641	39,53
2.	Angkutan darat	40 360	0,39
3.	Angkutan perairan	5 648	0,05
4.	Angkutan udara	761	0,01
5.	Penyediaan akomodasi	577 278	5,57
6.	Penyediaan makan minum	4 653 677	44,90
7.	Jasa agen perjalanan	70 382	0,68
8.	Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	139 071	1,34
9.	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	26 657	0,26
10.	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya	208 306	2,01
11.	Lainnya	544 876	5,26
	Jumlah	10 363 657	100,00

Tabel 8. Struktur Pengeluaran Pemerintah Dalam Promosi dan Pembinaan Pariwisata (*Current Expenditure*) Menurut Jenis Aktivitas Tahun 2015 (Miliar Rupiah)

	Pemerintah				
Jenis Aktivitas	Pusat	Daerah	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		
Promosi pariwisata	947,13	846,50	1 793,64		
2. Perencanaan dan koordinasi pemb. Pariwisata	1 073,25	1 307,67	2 380,92		
3. Penyusunan statistik dan informasi pariwisata	266,47	867,23	1 133,69		
4. Penelitian dan Pengembangan	1 091,30	967,72	2 059,02		
Penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata	80,25	395,55	475,80		
6. Pengamanan dan perlindungan wisatawan	49,19	145,93	195,12		
7. Pengawasan dan pengaturan	103,18	181,15	284,32		
8. Lainnya	273,89	129,70	403,59		
Jumlah	3 884,65	4 841,44	8 726,10		

 Tabel 9.
 Peranan Pariwisata dalam Struktur Output dan PDB Tahun 2015

		Produksi/Ou	tput	PDB		
	SEKTOR PRODUKSI	Total (Miliar Rp)	% Par	Total (Miliar Rp)	% Par	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pertanian	67 677,7	3,59	57 013,8	3,66	
2.	Pertambangan dan Penggalian	31 168,6	2,59	23 125,7	2,62	
3.	Industri Manufaktur	313 890,3	4,51	124 847,2	4,80	
4.	Listrik, Gas dan Air	13 001,6	2,73	1 560,6	0,58	
5.	Konstruksi	128 790,4	3,77	46 772,6	3,87	
6.	Perdagangan	52 692,1	2,32	35 743,8	2,33	
7.	Angkutan Kereta Api	2 646,7	15,40	749,5	13,52	
8.	Angkutan Darat	38 396,3	6,65	18 781,2	6,64	
9.	Angkutan Air	9 165,4	5,56	2 885,4	5,47	
10.	Angkutan Udara	52 986,4	12,28	17 701,4	12,34	
11.	Jasa Penunjang Angkutan	15 465,3	9,46	9 025,7	9,66	
12.	Penyediaan Akomodasi	97 894,4	73,13	62 175,5	74,82	
13.	Penyediaan Makan Minum	88 797,9	14,66	38 489,2	14,70	
14.	Komunikasi	21 835,5	3,35	14 067,2	3,40	
15.	Jasa Lainnya	56 035,0	1,67	36 686,1	1,71	
	Jumlah	990 443,6	4,44	489 624,9	4,25	

Nesparnas 2016 (Buku 1)

109

Lampiran A. Kode Klasifikasi Usaha Pariwisata

Kategori lapangan Usaha

47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor

- 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (Tradisional)
- 47242 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
- 47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- 47781 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu,
- 47782 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang
- 47783 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam
- 47784 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik
- 47785 Perdagangan Eceran Lukisan
- 47789 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya

49 Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa

- 49112 Angkutan Jalan Rel Khusus Wisata
- 49222 Angkutan Bus Pariwisata
- 49425 Angkutan Darat Lainnya Untuk Wisata

50 Angkutan Perairan

- 50113 Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Wisata
- 50123 Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Wisata
- 50213 Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap Da

51 Angkutan Udara

51107 Angkutan Udara Khusus Untuk Wisata

55 Penyediaan Akomodasi

- 55111 Hotel Bintang Lima
- 55112 Hotel Bintang Empat
- 55113 Hotel Bintang Tiga
- 55114 Hotel Bintang Dua
- 55115 Hotel Bintang Satu
- 55120 Hotel Melati
- 55130 Pondok Wisata (Home Stay)
- 55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel)
- 55192 Bumi Perkemahan
- 55193 Persinggahan Karavan
- 55194 Vila

Kategori lapangan Usaha

55195 Apartemen Hotel

55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya

56 Penyediaan Makanan dan Minuman

56101 Restoran

56102 Warung Makan

56103 Kedai Makanan

56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap

56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)

56290 Penyediaan Makanan Lainnya

56301 Bar

56303 Rumah Minum/Kafe

56304 Kedai Minuman

56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional

56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

59 Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik

59140 Kegiatan Pemutaran Film

68 Real Estat

68110 Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

68120 Kawasan Pariwisata

70 Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen

70201 Jasa Konsultan Pariwisata

79 Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya

79111 Jasa Agen Perjalanan Wisata

79120 Jasa Biro Perjalanan Wisata

79910 Jasa Informasi Pariwisata

79920 Jasa Pramuwisata

82 Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha Lainnya

82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Kon

82302 Jasa Event Organizer

84 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

84126 Pembinaan Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga

Kategori lapangan Usaha

85 Pendidikan

85498 Jasa Pendidikan Kerajinan dan Industri

85499 Jasa Pendidikan Lainnya Swasta

90 Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

90001 Kegiatan Seni Pertunjukan

90002 Kegiatan Pekerja Seni

90003 Jasa Penunjang Hiburan

90004 Jasa Impresariat Bidang Seni

90009 Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya

91 Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya

91011 Perpustakaan dan Arsip Pemerintah

91012 Perpustakaan Swasta

91021 Museum Yang Dikelola Pemerintah

91022 Museum Yang Dikelola Swasta

91023 Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah

91024 Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta

91025 Taman Budaya

91029 Wisata Budaya Lainnya

91031 Kegiatan Taman Konservasi Alam

91032 Taman Nasional (TN)

91033 Taman Hutan Raya (Tahura)

91034 Taman Wisata Alam (TWA)

91035 Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar A

91036 Taman Laut

91037 Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru

91039 Kegiatan Taman Konservasi Alam Lainnya

92 Kegiatan Perjudian dan Pertaruhan

92000 Kegiatan Perjudian dan Pertaruhan

93 Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya

93111 Fasilitas Billiard

93112 Lapangan Golf

93113 Gelanggang Bowling

93114 Gelanggang Renang

93116 Lapangan Tenis Lapangan

93117 Kegiatan Pusat Kebugaran/Fitness Center

Kategori lapangan Usaha

- 93118 Sport Centre
- 93119 Kegiatan Fasilitas Olahraga Lainnya
- 93191 Promotor Kegiatan Olahraga
- 93210 Kegiatan Taman Bertema Atau Taman Hiburan
- 93221 Pemandian Alam
- 93222 Wisata Gua
- 93223 Wisata Petualangan Alam
- 93229 Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- 93231 Wisata Agro
- 93232 Taman Rekreasi/Taman Wisata
- 93233 Kolam Pemancingan
- 93241 Arung Jeram
- 93242 Wisata Selam
- 93243 Dermaga Marina
- 93249 Wisata Tirta Lainnya
- 93291 Kelab Malam dan Atau Diskotik
- 93292 Karaoke
- 93293 Usaha Arena Permainan
- 93299 Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl

96 Jasa Perorangan Lainnya

- 96121 Panti Pijat
- 96122 SPA (Sante Par Aqua)